ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang politik Islam menurut Ahmad Hassan dengan judul "Pemikiran Politik Islam Menurut Ahmad Hassan dalam Perspektif Politik Islam Indonesia". Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan besar: *pertama*, bagaimana pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam. *Kedua*, bagaimana penerapan konsep pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam. *Ketiga*, dimana posisi pemikiran Ahmad Hassan dalam peta perkembangan politik Islam di Indonesia.

Data penelitian ini dihimpun melalui penelusaran data melalui proses intensifikasi kajian teks. Pemaparan studi ini mengunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengambarkan secara utuh tentang pemikiran politik Ahmad Hassan yang kemudian dianalisis dalam kerangka perkembangan politik Islam Indonesia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama,* dalam pandangan Ahmad Hassan, Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia mulai dari karohanian sampai masalah politik kenegaraan. Demi mewujudkan suatu suatu negara Islam yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Maka kaum muslimin harus melaksanakan seluruh ajaran agama Islam di setiap sendi kehidupan. Ahmad Hassan berkeyakinan bahwa hanya Islam yang memberikan dasar dan moral bagi negara, agama telah memberikan ajaran yang lengkap bagi kehidupan manusia. *Kedua,* bahwa undang-undang dan peraturan-peraturannya yang sesuai dengan al-Qur'an haruslah dilaksanakan. Pemerintahan Islam baginya adalah pilihan lain dari faham kebangsaan yang dianggapnya sebagai tidak memberikan tempat bagi agama. Beliau menginginkan Islam memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, sesuai dengan keyakinan bahwa kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Islam dipandang sebagai sesuatu yang tertinggi dan terluas menerjang batas-batas kebangsaan dan ketanahairan. *Ketiga,* Ahmad Hassan adalah seorang pemikir yang fundamentalis,dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, Ahmad Hassan ingin mengubah masyarakat Islam sampai ke akar-akarnya, dan ingin menghancurkan penyakit umat Islam dengan cara yang radikal secara revolusioner, secara jelas, tanpa samar-samar dan penuh kepastian. Suka atau tidak suka, menurut Ahmad Hassan, seorang muslim harus mengunakan hukum Islam di setiap tempat dan setiap hal

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan motifasi bagi kalangan negarawan, politisi, ulama', dan akademisi untuk mengkaji ulang atau memperdalam konsep kenegaraan yang ditawarkan Islam. Dan semoga para pembaca meneladani jejak langkah dan perjuangan Ahmad Hassan. Serta alangkah baiknya jika dikemudian hari ada penelitian tentang gagasan-gagasan Ahmad Hassan dari sudut pandang lain. Karena penelitian yang dilakukan untuk mengkaji Ahmad Hassan dirasa masih sangat sedikit dan minim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Dalam diskursus keagamaan kontemporer, dijelaskan bahwa "agama" ternyata mempunyai banyak wajah (*multifaces*) dan bukan lagi seperti pemahaman orang-orang terdahulu, yakni semata-mata hanya terkait dengan persoalan ketuhanan, kepercayaan, keimanan, kredo, pedoman hidup, dan seterusnya. Selain ciri dan sifat konvensionalnya yang memang mengasumsikan bahwa persoalan keagamaan hanyalah semata-mata persoalan ketuhanan, agama juga terkait erat dengan persoalan-persoalan historis kultural yang merupakan keniscayaan manusia.[1]

Campur aduk masalah keagamaan dengan kepentingan-kepentingan yang lain, merupakan suatu persoalan keagamaan kontemporer yang paling rumit untuk dipecahkan. Apalagi terkait masalah agama dengan politik kenegaraan. Karena memang hal itu mempunyai multi tafsir, dan analisis serta sudut pandang yang berbeda dari para pemikir.

Wacana tentang hubungan antara Islam dan politik, atau Islam dan negara senantiasa menarik untuk dikaji. karena wacana tersebut juga melibatkan berbagai kalangan, baik itu dari kiai, politisi, akademisi, partai maupun negara, dan juga melintasi rentang waktu yang panjang dalam sejarah

[1] Moh Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam,* h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik di negeri ini. Wacana tersebut telah melahirkan berbagai bentuk konflik dan kompromi yang mencerminkan kekuatan sekaligus kelemahan kelompok Islam itu sendiri. Dengan kekuatan dan kelemahan itu, Islam diharapkan bisa lebih kongkrit berperan dalam kehidupan bernegara.

Ada beberapa hal yang menarik perhatian para pemikir, aktifis dan ahli hukum muslim Indonesia selama kurang lebih enam puluh tahun, sejak kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin membaharui muslim Indonesia dengan wajah yang baru dan dengan pemikiran yang baru pula. Seperti kaum muslimin di belahan dunia lainnya, kaum muslim Indonesia merespon beberapa persepsi tersebut secara berbeda.[2]

Dari respon yang yang ada, kelompok muslim dapat dikatagorisasikan menjadi beberapa kelompok. Salah satu kelompok utama yang sering disebut dengan *"santri"*, yakni kelompok muslim yang mengidentifikasi diri dengan kuat pada keyakinan, ritual, dan fikih tradisional Islam Timur Tengah dan berupaya menyesuaikan budaya lokal, pemikiran intelektual, dan istitusi-institusi politik dengan sistem keagamaan tersebut.[3] Istilah santri ini menjadi istilah yang multi makna tergantung pada konteks apa kata ini digunakan. Dalam bahasa antropologi seperti dikenalkan oleh Clifford Geertz, *santri* adalah varian yang dilawankatakan dengan kata abangan, yang tidak memiliki gairah keIslaman lebih dari sekedar identitas kependudukan. Sementara dalam

[2] Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim,* h.7
[3] *Ibid,* h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terma keagamaan di Indonesia, *santri* bermakna orang-orang yang pernah belajar di pesantren.[4]

Kelompok kedua yang sering disebut "*muslim puritan*" masih terikat dengan adat-istiadat dan nilai-nilai pribumi Asia Tenggara, yang kadang-kadang memperbaharui keyakinan dan ritual Islam agar terhubung dengan beberapa ciri penting dari nilai-nilai pribumi dan menyukai teknologi serta mendukung solusi-solusi politik yang tampak sesuai dengan sistem nilai ini.[5]

Kelompok ketiga yang sering disebut dengan *"nasionalis"* merespon pemikiran sekuler barat tentang negara bangsa, tentang pentingnya nilai-nilai kewargaan yang muncul secara nasional, dan tentang pengunaan teknologi untuk menciptakan ekonomi nasional yang makmur.[6]

Perbedaan ketiga kelompok tersebut di atas terletak pada aspek interpretasi ideologis yang melatarbelakangi aplikasi pikiran-pikiran kebangsaan mereka. Tujuannya sama mulia, yaitu merealisasikan kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan. Tetapi bagaimana menggapainya adalah hal yang berbeda. Inilah yang melahirkan perbedaan simbol dan wacana di antara mereka.

Interaksi dari ketiga kelompok ini merupakan faktor penting dalam perkembangan kehidupan sosial dan politik di Indonesia pada abad yang lalu. Ada problem-problem nyata dalam masalah ini, tapi beberapa kategori

[4] *Ibid,* h. 7
[5] *Ibid,* h.8
[6] *Ibid*. h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini penting untuk mengindentifikasi kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Organisasi-organisasi Islam utama, yang muncul di Indonesia pada abad ke-20, antara lain Syarekat Islam, Muhammadiyyah, Nahdlatul Ulama' dan Masyumi. Semuanya mewakili kelompok yang menekankan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek Islam Timur Tengah Tradisional.[7] Semua mementingkan keunggulan hukum Islam, walaupun konsep-konsep mereka tantang apa sebenarnya hukum Islam itu kabur antara satu dengan yang lainnya.

Alasan-alasan yang menyebabkan tidak terjadinya kesepakatan dan kekaburan itu terletak pada perbedaan-perbedaan tentang apa yang sebenarnya membentuk sumber-sumber agama Islam, walaupun ada perbedaan interpretasi tertentu mengenai sumber-sumber ini. Kaum tradisionalis (kaum tua), yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama', meyakini bahwa kebenaran agama termuat di dalam tulisan-tulisan ulama' salaf, khususnya kitab yang ditulis oleh fuqaha' dan para teolog.

Kaum modernis (kaum muda), yang diwakili oleh Muhammadiyyah, berpendapat bahwa penelitian dan interpretasi baru (*ijtihad*) terhadap dasar-dasar agama harus dilakukan, bukan bertumpu pada tradisi para penafsir masa silam. Pendekatan ketiga mungkin lebih tepat sebagai sesuatu variasi dari pendekatan kaum modernis, yang diwakili oleh Persatuan Islam yang menjadi

[7] *Ibid*, h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu materi pokok dalam penulisan skripsi ini, yaitu memberikan penekanan khusus pada makna penting al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber penelitian keagamaan.[8]

Dari berbagai pandangan tentang kebenaran agama yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta hubunganya dengan teori suatu negara Islam memang menjadi suatu masalah tersendiri. Di dunia pesantren, sulit diperoleh suatu karya yang berarti tentang masalah ini. Banyak kalangan yang berbicara tentang sebuah negara dengan agama, namun sayangnya belum ada yang mampu mengartikulasikan hakekat dan corak suatu negara yang ingin mereka ciptakan.[9] Federspiel mengolongkan kelompok masyarakat yang memandang hakekat dan corak suatu negara menjadi tiga.

Pertama, adalah golongan sekuler, yakni golongan yang memisahkan antara agama dan negara, mereka memandang bahwa antara agama dan negara tidak ada kaitannya, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Agama dipandang hanya mengatur urusan individu dengan Tuhannya dan negara terlepas dari aturan-aturan agama itu. Negara mempunyai cara sendiri untuk mengatur pemerintahannya, dan tanpa agamapun suatu negara bisa berdiri sendiri.

Kedua, ada yang menganggap bahwa dalam ajaran Islam sendiri tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana cara mengatur negara itu sendiri,

[8] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, h.19
[9] Ahmad Syafi'i Ma'arir, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* h.125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena konsep kenegaraan dalam Islam tidak pernah baku tentang teori ini (baca: sistem politik), mulai dari zaman Nabi S.A.W, para sahabat, tabi'in, sampai pada para intelektual dan politisi Islam sekarang ini.[10] Dengan situasi yang seperti itulah, tidak jarang dan bahkan sering sekali akan menimbulkan konflik dan peperangan yang ahirnya bermuara pada perpecahan dan hilangnya persatuan Islam dan rasa kebersamaan diantara umat Islam itu sendiri.[11] Dari sisi lain ada anggapan pemikiran yang menghendaki bahwa Islam tidak harus secara simbolik masuk dalam kehidupan negara, tetapi yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai dan prinsip Islam itu masuk dalam sejarah kehidupan politik dan bernegara, baik melalui pendekatan spritual atau kultural dengan akhlakul karimah seperti yang dilakukan Nabi S.A.W yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan mesra antar sesama rakyat.

Ketiga, dianggap sebagai pemikiran *simbiosis mutualisme*. yang menganggap bahwa, Islam adalah agama yang sempurna, Islam dan politik terkait secara organik, atau tidak dapat dipisahkan[12]. Islam memuat cara hidup yang lengkap, yakni totalitas lengkap yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Mengatur sendi-sendi kehidupan sampai masalah politik. Bahwa Islam adalah agama sekaligus negara. Antara Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang saling menyatu, saling berinteraksi dimana negara berdasarkan syari'at Islam dengan ulama' sebagai penasehat resmi

[10] AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, h.5
[11] *Ibid,* h.6
[12] Abdul Aziz, *Politik Islam Politik*, h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Islam menjadi keniscayaan untuk dipakai sebagai dasar untuk mengatur kehidupan suatu negara

Dan salah satu pemikir politik Islam di Indonesia yang senada dengan pemikiran politik Islam tradisional atau pemikiran fundamental dan yang agak lebih extrim dalam pemikiran politik itu adalah Ahmad Hassan. Ahmad Hassan adalah figur sebagai seorang ulama' dan juga tokoh sentral dalam Persatuan Islam, yaitu sebuah partai Islam di awal menuju kemerdekaan Indonesia.

Dan dari beberapa kajian tentang Persatuan Islam inilah, penulis mengungkapkan pemikiran-pemikiran Ahmad Hassan, karena beliaulah salah satu pemikir utama dalam Persatuan Islam. Yaitu sebuah partai yang secara formal berdiri pada 11 September 1923 di Bandung[13]. Sebuah partai yang salah satu tujuan pendirianya adalah untuk memperluas diskusi-diskusi tentang keagamaan.

Pembahasan tokoh yang di bahas dalam skripsi ini adalah Hassan bin Ahmad. Tapi orang sering menulisnya dengan Ahmad Hassan atau A. Hassan. Dan bahkan ada yang menyebut dengan Hassan Bandung karena perjuangannya dimulai dari Bandung. Ahmad Hassan adalah pahlawan sekaligus tokoh pemikir Islam Indonesia yang menghendaki keharusan adanya pemerintahan Islam. Ahmad Hassan menginginkan Islam memasuki seluruh

[13] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam* h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek kehidupan manusia, sesuai dengan keyakinannya, bahwa kebenaran ajaran Islam adalah mutlak.

Bukti nyata dari apresiasi ini adalah terus berkarya dan berkreativitas dalam mengisi pembangunaan bangsa, meneruskan perjuangannya yang belum tercapai serta tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi disertai dengan nilai-nilai religiusitas yang cukup militan. Apabila kedua unsur tersebut berintegrasi pada seorang warga bangsa, maka hampir bisa dipastikan negara tesebut memiliki harkat dan martabat yang cukup tinggi di mata dunia internasional.[14]

Pergulatan politik pada masa kemerdekaan Indonesia adalah siasat politik yang masih murni sebagai gerakan nasional yang melakukan resistensi (perlawanan) terhadap penjajah dalam hal ini adalah Belanda dan Jepang. Gerakan politik pada masa ini ditandai dengan sikap yang masih menjunjung tinggi kebersamaan dan meminimalisasi aspek-aspek yang justru akan menimbulkan perpecahan dan pada ujungnya menyebabkan sulitnya mewujudkan kemerdekan Indonesia.

Dalam dinamikanya di Indonesia, pemikiran tentang Islam politik juga menampakkan wajah yang kompleks. Hal itu bisa dilihat pada masa lalu, yakni abad ke-13 dan abad ke-14, ketika Islam dikenalkan dan disebarluaskan di Indonesia. Bangkitnya gerakan nasionalisme pada dekade awal abad ke-20 menandai permulaan diskursus Islam politik secara lebih jelas. Pada masa itu,

[14] Deddy Rahman, Ulama' Besar. Adiy an-nawawi. www.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan dengan visi politik yang jelas, yakni menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tidak diragukan lagi, dalam gerakan nasionalistik itu Islam memainkan peran penting, bahwa Islam bukan saja mata rantai yang mengikat nasionalisme Indonesia, melainkan juga menjadi simbol kesamaan nasib dalam menentang penjajahan Belanda.[15]

Tapi Menurut Ahmad Hassan yang juga tokoh Persatuan Islam (Persis) ini, ia mengatakan bahwa nasionalisme sama dengan '*ashabiyyah*. Berpegang teguh pada '*ashabiyyah* dan berjuang dengan '*ashabiyyah* maupun menggunakan dasar atau landasan '*ashabiyyah* adalah tidak termasuk golongan Nabi Muhammad saw. Maka, atas dasar ini bisa disimpulkan bahwa nasionalime atau paham kebangsaan bertentangan dengan ajaran Islam.[16]

Hal itulah yang dikatakan oleh Ahmad Hassan dengan pergerakan faham kebangsaan saat itu, sehingga ia menilai "bahwa masuk dan membantu pergerakan-pergerakan yang berdasar kebangsaan itu dosa, karena sekurang-kurangnya pergerakan kebangsaan itu menuju kepada membuang undang-undang Allah dan Rasul-Nya dan mengantikan dengan hukum-hukum buatan manusia"[17].

---

[15] Abdul Aziz, *Politik Islam Politik*, h.23
[16] Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung,* Hassan Bandung, h.34
[17] A. Hassan, *Islam dan Kebangsaan, h.25*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka berfikir Ahmad Hassan banyak dipengaruhi oleh orang tuanya yang berfaham Wahabi[18]. Konsep pemikiran Ahmad Hassan berangkat dari pengakuannya bahwa hanya al-Qur'an dan Sunnah sajalah yang menjadi pokok sumber hukum Islam. Selanjutnya ia menyatakan bahwa umat Islam harus melaksanakan hukum-hukum Allah dan untuk itu harus ada pemerintahan Islam. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengaharuskan adanya hukum-hukum Allah tersebut, jika tidak ada maka kita akan berbuat kezaliman.[19]

Dari berbagai gambaran latarbelakang tersebut, penulis tertarik melakukan kajian terhadap pemikiran Ahmad Hassan. Meskipun ada yang memandang bahwa tokoh ini kecil, tidak begitu populer, tapi tidak bagi penulis. Ada sisi-sisi menarik yang penulis tangkap dari hasil pemikiran beliau, yaitu dibidang politik atau kebangsaan. Tentang pandangan beliau terhadap politik Islam itu sendiri serta implikasi pemikiran beliau terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia.

[18] Wahabi adalah suatu istilah yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791), seorang ulama' yang mengadakan gerakan pemurnian ajaran Islam, terutama di bidang akidah.

[19] AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, h.148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Ahmad Hassan tentang politik Islam di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi (penerapan) konsep pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam?
3. Bagaimana posisi pemikiran politik Ahmad Hassan dalam peta perkembangan politik Islam di Indonesia

C. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, kajian terhadap sosok Ahmad Hassan memang pernah ada yang membahas atau melakukan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut, pada temanya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pertama, buku yang membahas pemikiran Ahmad Hassan dalam berbagai aspek, Entah itu dalam bentuk buku ataupun yang lainnya, salah satunya adalah buku "*Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal"* karya Syafiq A. Mughni yang mengambarkan riwayat hidup Ahmad Hassan, latarbelakang keagamaan Ahmad Hassan, karir Ahmad Hassan secara lengkap dan gamblang. Serta memaparkan ide-ide yang berkenaan dengan agama maupun politik. Buku tersebut juga memperkenalkan kontribusi Ahmad Hassan dan murid-muridnya yang menjadi tokoh Persatuan Islam. Dijelaskan juga bagaimana hubungan Ahmad Hassan dengan Soekarno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tulisan karya Howard M. Federspiel dalam buku "*Persatuan Islam"* dan "*Labirin Ideologi Muslim*" yang membahas tentang keyakinan dasar Ahmad Hassan dan kepercayaan-kepercayaan dasar Persatuan Islam. Selain itu membahas juga konrtribusi Ahmad Hassan yang menjadi tokoh Persatuan Islam, yaitu sebuah organisasi pergerakan yang mirip dengan gerakan-gerakan Islam Indonesia lainnya karena memiliki kesamaan perhatian yaitu beliau berusaha mendefinisikan kepada masyarakt Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan Islam. tentang apa prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dan apa prilaku religius yang tepat untuk agama Islam.

Ketiga, sebuah buku yang berjudul "*Gerakan Islam di Perlis*" karangan Abdullah Abdul Rahman membahas tentang riwayat hidup Ahmad Hassan dan juga perdebatan dengan beberapa tokoh semasa hidup Ahmad Hassan. Buku ini membahas juga kawan-kawan Ahmad Hassan, serta pandangan beberapa tokoh terhadap Ahmad Hassan, baik itu berupa komentar tentang kepribadian Ahmad Hassan, tentang keahlian Ahmad Hassan maupun tentang peranan Ahmad Hassan dalam Persatuan Islam.

Harry Muhammad, dalam bukunya "*Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20".* Dalam buku tersebut menggambarkan pandangan Ahmad Hassan tentang demokrasi dan pandangan Ahmad Hassan tentang sekularisme serta bahayanya bertaklid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam di Indonesia.
2) Untuk mengetahui implementasi konsep pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam.
3) Untuk mengetahui pemikiran Ahmad Hassan dalam peta perkembangan politik Islam di Indonesia.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna:

1) Secara teoritis:
   a) Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam fikih siyasah terutama dalam kaitanya dengan politik Islam di Indonesia.
   b) Untuk memperkenalkan sosok Ahmad Hassan sebagai salah satu tokoh pemikir politik Islam di Indonesia.
   c) Menelaah kembali pemikiran Ahmad Hassan tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik dalam Islam maupun pemikiran Ahmad Hassan dengan hukum-hukum Islam sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Secara praktis: untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Ahmad Hassan maupun gagasan-gagasan lainnya.

F. Definisi Operasional

1) Politik Islam: yang dimaksud adalah segenap konsepsi politik dan hubungan manusia dengan kekuasaan (politik) yang dilandasi atau diilhami oleh petunjuk Islam. Dalam terma Arab, politik Islam yang dimaksud adalah disebut dengan *al-fiqh al-siyāsī*.
2) Perspektif pemikiran politik Ahmad Hassan: yaitu pandangan, penilaian serta pemikiran beliau tentang politik Islam itu sendiri. Pemikiran politik Islam Ahmad Hassan yang dimaksud adalah pandangan dan pendapatnya yang tertuang dalam karya-karya yang ditulisnya.
3) Relevansi pemikiran politik Ahmad Hassan tentang pemikiran politik Islam di Indonesia: keterkaitan dan kesesuaian pandangan politik Ahmad Hassan dengan perkembangan peta politik Islam di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau literatur. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[20] Adapun penelitian ini adalah bersifat historis, karena meneliti tentang tokoh dan pemikiranya, serta deskriptif-analisis[21], yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam.

2) Data yang Dikumpulkan

1. Pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam yang terdapat dalam beberapa karya beliau, maupun hasil kajian seseorang terhadap pemikiranya
2. Biografi tentang beliau, latarbelakang politik serta tentang keilmuan beliau yang dibahas dalam karya lain.

3) Sumber Data

Sumber rujukan penelitian ini di antaranya:

a. Sumber data primer. Dalam penulisan ini adalah buku-buku karangan Ahmad Hassan yang berkaitan langsung dengan pemikiran politiknya. Dalam konteks ini adalah pikiran-pikirannya yang dituangkan dalam buku *Islam dan Kebangsaan* (Bangil, Persatuan, Cet III, 1972).

b. Sumber data sekunder

1. Abdullah Abdul Rahman, *Gerakan Islam di Perlis, Sejarah dan Pemikiran,* Malaysia, Pena SDN.BHD, 1989.

[20] Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, h.3
[21] Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, Kediri, Jenggala Pustaka Utama, 2007.
3. Abdul Aziz, *Politik Islam Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006.
4. Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta, Raja Garafindo Persada, 2003.
5. Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* Jakarta, Amzah, 2005.
6. Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
7. Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Press, 1996.
8. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1993.
9. Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, *Pemikir Islam Radikal*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1994.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada sumber-sumber yang telah ada, baik yang di tulis secara lansung oleh Ahmad Hassan maupun sumber-sumber sekunder yang lain. Penulis berusaha membaca, menganalisis dan mengkritisi pemikiran tokoh ini.

Setelah data terkumpul, maka teknik yang digunakan adalah membaca teks dan pembuatan catatan penelitian. Dalam pembacaan teks yang ditulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Ahmad Hassan maupun hasil pembacaan orang lain terhadapnya, penulis menelaah terlebih dahulu dan berusaha mengkritisi agar memperoleh hasil yang maksimal.[22]

5) Analisis Data

Data akan dianalisis mengunakan instrumen analisis deduktif dan hemeneutika. Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik kewilayah khusus sehingga hasil analisis nantinya akan fokus pada pemikiran Ahmad Hassan mengenai pemikiran politik Islam dalam pandangan beliau.[23]

Sedangkan penggunaan hermeneutik sebagai analisis penelitian ini lebih didasari pemikiran bahwa: untuk memahami makna yang terkandung dalam data beberapa tulisan tentang Ahmad Hassan perlu sebuah upaya penafsiran dan alat yang dapat digunakan untuk maksud tersebut adalah metode hermeneutika. Dengan kata lain, melalui hermeneutika peneliti berupaya mengubah ketidaktahuan peneliti akan pesan tekstual dan fenomena sosiologis, kultural maupun historis pada saat Ahmad Hassan hidup.[24]

---

[22] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* h.49

[23] Syaifuddin Anwar, *metode Penelitian*, h.40

[24] Jon Avery dan Hasan Akari, *menuju Hunabisne Spritual: Kontribusi Perspektif Muslim Humanis,* h.164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latarbelakang masalah yang dikaji. Hal ini juga merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab berikutnya. Dalam hal ini meliputi: latarbelakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pemabahasan.

BAB II : Pembahasan tentang peta perkembangan politik, yang mengkaji tentang politik dalam Islam dan ketatanegaraan dari berbagai sudut pandang. Baik itu dalam Islam, maupun politik di Indonesia sendiri.

BAB III : Biografi, Pemikiran Ahmad Hassan tentang politik Islam serta latarbelakang pemikiranya.

BAB IV : Analisis terhadap pemikiran Ahmad Hassan serta relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini.

BAB V : Penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PETA PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Definisi Politik Islam

Istilah politik dalam kamus ilmiah Indonesia diartikan sebagai siasat, kebijakan yang menyangkut urusan kenegaraan[1]. Sedangkan politik dalam bahasa Arabnya disebut "*Siyāsah*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*politic*". Politik itu sendiri berarti cerdik atau bijaksana. Namun dalam pembicaraan yang sering kita pakai setiap hari, biasanya politik diartikan sebagai suatu cara untuk mensiasati lawan, baik siasat itu dengan cara yang positif atau dengan cara negatif yang berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan. Tetapi sebenarnya para ahli politik pun mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik sama saja membicarakan negara atau tata pemerintahan, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata "*polis*" yang berarti "negara kota", dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia

[1] M. Dahlan dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, h.621

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hidup bersama dan dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan. Tapi politik bisa juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik dan pembagian atau kata-kata serumpun.[2]

Terminologi politik pada dasarnya pertama kali dikenalkan dari buku Plato yang bejudul *poletea*, yang kemudian dikenal dengan Republik. Istilah tersebut kemudian ditemukan pula dalam karya Aristoteles, murid Plato yang berjudul *politea.* Kedua karya tersebut dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Artinya pergulatan tentang politik, utamanya berkaitan dengan historis, tidak bisa dilepaskan dari kedua karya monumental tentang politik di atas[3].

Istilah politik dari Plato dan Aristoteles merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Kedua filosof tersebut menekankan pembahasan tentang politik berkaitan dengan masalah, yaitu bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Agar upaya tersbut berhasil, maka politik memerlukan seperangkat alat atau unsur-unsurnya, seperti menjalankan pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan

[2] Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Politik*, h.18
[3] Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, h.167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.[4]

Ada juga yang mengartikan politik ke dalam dua definisi. *Pertama,* pandangan yang mengkaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua,* pandangan yang mengkaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan konflik. Maka perbedaan pengertian ini berkaitan dengan digunakanya pendekatan yang berbeda tentang politik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan prilaku.

Dengan demikian, politik berkaitan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan negara beserta ruang lingkupnya. Pengkaitan pengelolaan negara bertujuan agar fungsi-fungsi kenegaraan berjalan dengan baik. Pengelolaan tersebut pada ahirnya tidak hanya berkaitan dengan sistem negara, tetapi juga berkaitan dengan prilaku politik dan institusi politik dalam negara. Jadi hakekat politik adalah prilaku manusia, baik berupa aktifitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi dan mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan mengunakan kekuasaan.

Sedangkan dalam Islam, istilah politik Islam berarti "*siyāsah shārʿiyyah*" yang diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Listono Santoso, bahwa *siyāsah sharʿiyyah* diartikan sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan

[4] *Ibid*, h.167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat Islam, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama' mujtahid.[5] Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyāsah shar' iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dari beberapa pandangan tokoh Islam tentang pandangan *siyāsah shar' iyyah* politik Islam di atas dapat dirumuskan tentang pengertian *siyāsah shar' iyyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyāsah shar' iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.[6]

---

[5] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h.5
[6] *Ibid*, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hakekat *siyāsah shar'iyyah* dapat disimpulakan bahwa sumber-sumber pokok *siyāsah shar'iyyah* adalah wahyu al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan bernegara, namun aturan itu juga bisa terbentuk dari manusia itu sendiri dari lingkungan sekitar yang berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat yang berlaku.

B. Tipologi Pemikiran Islam

Kemelut perdebatan yang sering muncul terkait masalah politik Islam telah bergaung dimana-mana, perdebatan antara Islamis (radikalisme) dan sekularis (liberalisme) ini akan senantiasa menarik untuk dikaji, baik itu di negara Mesir, Iran, Iraq, Pakistan dan belahan penjuru dunia termasuk Indonesia. Dari perdebatan-perdebatan itu akan muncul klaim-klaim tentang kebenaran masing-masing. Karena radikalisme dan liberalisme dalam konteks ini telah menjadi suatu madzhab.[7]

Sebelum membahas lebih jauh tentang karakteristik atau tipologi pemikiran Islam, kiranya perlu penulis jabarkan tentang prinsip dasar teori politik Islam, yaitu Iman terhadap ke-Esa-an dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam adalah

[7] Moh. Nurhakim, *Islam Responsif,* h.92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa makhluk yang bernama manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi serta penguasaan atas semuanya. Tidak seorangpun yang akan diperkenankan memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri dan tidak seorangpun diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan seperti ini. Tidak seorangpun yang diberi hak istimewa untuk membuat undang-undang sekehendak hatinya sendiri dan tidak seorangpun yang wajib mengingatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk dengan cara seperti ini. Hak ini hanya merupakan hak Allah.[8]

Baik Islam liberal maupun Islam fundamental sebenarnya berakar pada gerakan Islam revivalis (salafi) yang lahir sebelum periode modern (abad ke-18), seperti Wahabi di Arab Saudi, al-Sanusiah di Afrika Utara, al-Mahdi di Sudan, al-Dihlawi di India, Hassan al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan kaum Paderi di Indonesia.

Gerakan revivalis mempunyai dua faksi. *Pertama*, revivalis-politik yang cenderung bersifat lebih keras dan radikal seperti diwakili oleh Wahabi. *Kedua*, revivalis-nonpolitik yang bersifat moderat dan lebih lunak dari yang pertama, seperti yang diwakili oleh al-Dihwali dan Hassan al-Banna. Namun, kedua faksi ini tetap setia pada pemikiran revivalisme, yaitu mempertahankan kemurnian akidah, kesesuaian cara ibadat, serta moralitas sosial Islam[9].

---

[8] Sayyid Abul A'la Maududi, *System Politik Islam*, h.157
[9] Moh. Nurhakim, *Islam Responsif*, h.92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam periode modern Islam (abad ke-19) dasar-dasar pemikiran revivalisme diatas tetap dijadikan salah satu paradigma pembaharuan oleh kelompok modernis seperti al-Afghani, Muhammad Abduh, Ahmad Khan, Mohammad Iqbal, dan Ahmad Dahlan. Dasar pemikiran yang terpenting adalah akidah Islam yang dijamin otentisitasnya. Maka dari sinilah, apa yang disebut Islam liberal dan Islam radikal sebagai yang dimaksud sekarang, mulai muncul benih-benihnya. Dan, disinilah letak kedua gerakan ini, yaitu terlahir dari revivalisme. Hanya saja, Islam liberal mengembangkan dasar-dasar revivalisme menjadi gaya modernisasi dunia Islam yang berbau barat (*western*). Benih Islam liberal pada periode ini (abad ke-19) dipelopori oleh murid-murid Muhammad Abduh seperti Ali Abd al-Raziq dan Thaha Hussein. Sedangkan Islam fundamental mengembangkanya menjadi kekuatan perlawanan terhadap modernisasi dalam arti *westernisasi* (pembaratan). Benih Islam radikal dipelopori oleh Hassan al-Banna serta Sayyid Qutb.[10]

Banyak konstruk pemikiran yang melahirkan berbagai pandangan tentang bagaimana kita, sebagai kaum muslimin menyikapi politik. Tentang bentuk kenegaraan yang seperti apa yang harus dipakai oleh suatu negara. Dari beberapa pemikiran para tokoh itu semua yang ahirnya mengarah pada karakter dan tipologi politik Islam itu sendiri. Namun secara umum para pemikir membaginya dalam tripologi. Dalam pandangan A. Djazuli, beliau membagi kerangka berfikir dunia Islam dewasa ini menjadi tiga tipe, *pertama*,

[10] *Ibid*, h.93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

liberal (sekuler) yaitu negara menolak hukum Islam secara penuh, *kedua,* fundamental (intergralistik) yaitu negara melaksanakan hukum Islam secara penuh, *ketiga,* moderat (simbiotik) yaitu negara yang tidak menjadikan sebagai suatu kekuatan struktural (dalam sektor politik), tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural, atau mencari kompromi.[11] Sedangkan menurut Din Syamsuddin, paradigma pemikiran politik Islam modern dibagi atas "tradisionalis", "modernis", dan "fundamentalis".[12]

1. **Tipologi Liberal**

Secara harfiah istilah liberal berarti bebas, yang menghendaki adanya kebebasan individu. Masyarakat liberal adalah representasi (perwakilan) dari sebuah komunitas yang didalamnya setiap individu mempunyai kebebasan untuk betindak, dalam kebebasan untuk berbeda pendapat, kebebasan untuk memeluk agama, dan berbagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhinya tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokratisasi.

Paradigma liberal, sesuai dengan maknanya yang sederhana, adalah bebas, merdeka dan tidak terikat. apabila diletakkan dalam konteks pemikiran, maka seorang yang memiliki tipikal berfikir liberal adalah mereka yang bebas untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat serta merdeka tanpa harus terikat pada segala bentuk pengetahuan dan otoritas manapun. Model demikian biasanya menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaanya. Manusia

[11] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* h.39
[12] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h.116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang pernah menjadi diktum awal *renaissance* adalah subyek otonom. Subyek yang memiliki kesadaran untuk berfikir, berbuat dan bertindak[13].

Pola liberal ini menekankan pemisahan antara agama dan negara, yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah politik atau kenegaraan. Islam hanyalah mengatur hubungan antara menusia dan Tuhan. Para penganut tokoh ini beranggapan bahwa agama itu bersifat universal sedangkan politik itu portikular (individu), maka dari itu antara agama dan politik tidak bisa bersatu.

Kelompok yang memisahkan agama dan negara ini menekankan argumentasi bahwa tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara, sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad. Beliau hanya Rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي
شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ
تَأۡوِيلًا ٥٩

[13] Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, h.89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikain itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S, al-Nisa': 59)*

Dalam menyikapi ayat ini, menurut Raziq sebagaimana dikutip oleh Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa ayat ini tidak ada kaitanya dengan pemerintahan apapun. Bagi Raziq, makna ūlī al-amr pada ayat diatas hanya mengacu pada para pembesar sahabat yang memahami seluk-beluk persoalan umat, atau yang menjadi pemimpin mereka. Ia menampik bahwa konsep tentang kepala negara mempunyai pijakan dalam al-Qur'an. Pendapat Raziq tidak sepenuhnya bisa dikatakan benar. Memang benar al-Qur'an tidak menyiapkan suatu konsep yang utuh, tetapi landasan dan nilai etika dari konsep-konsep itu terdapat dalam al-Qur'an.[14]

Tokoh-tokoh sekular walaupun sebagiannya mempunyai latarbelakang agama yang cukup kuat seperti Ali Abd al-Raziq yang menentang keras dikaitkannya Islam dengan politik. Menurutnya, Islam hanya sebuah agama ritual, tidak ada sistem politik dalam Islam. Sistem politik Islam dikatakan rekayasa para ulama di zaman pertengahan. Dan untuk menjawab kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin dan penggagas negara Islam Madinah, mereka mengatakan bahwa itu hanya satu kebetulan.

[14] Moch Syarif Hidayatullah, *Konsep Kepala Negara dalan Islam,* dalam www. Hasanain.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tipologi Fundamental

Secara harfiah istilah fundamental berarti mendasar, yang digunakan untuk menunjuk sikap politik suatu kelompok yang ekstrim, fanatik dan keras kepala. Golongan mengungkapkan bahwa Islam mencakup semua aturan kehidupan, termasuk urusan politik atau kenegaraan. Argumen yang diberikan oleh kelompok ini, bahwa Nabi telah selesai dan telah memberikan garis panduan yang jelas seperti ketika Nabi berada di Madinah.

Fundamentalisme dalam Islam mempunyai akar sejarah yang panjang. Ia muncul secara tiba-tiba seperti disinyalir oleh para penulis dibarat, yaitu sejak Refolusi Iran, Afganistan dan Lebanon. Berangkat dari sudut pandang di atas, Hanafi melihat akar-akar historis dan perkembangan gerakan fundamentalisme Islam kontemporer dimulai pada fase awal sejarah perkembangan Islam klasik.[15]

Mula-mula gerakan ini muncul dipelopori oleh seorang fuqoha' Imam Ahmad Ibn Hambal atau yang dikenal dengan pendiri madzhab Hambali (780-855 M). kemunculannya sebagai reaksi atas kecenderungan menguatnya aliran rasionalis yang dipelopori oleh Mu'tazilah dan didukung oleh pemerintahan Bani Abbas. Pemikiran rasionalis dinilai tidak Islami, karena terpengaruh oleh filsafat Yunani, yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Untuk itu,

[15] Moh. Nurhakim, *Islam Responsif*, h.102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad berusaha membangun dasar-dasar teologis, dan berhasil meletakkan fondasi gerakan Salafi[16].

Di pusat Islam, yaitu Makkah dan Madinah, semangat pembangunan sosio-moral mencapai puncaknya pada abad ke-18 dengan gerakan fundamentalis yang dikembangkan oleh Muhammad Ibn Abd al-Wahab (1703-1787). Para pengikut Abd al-Wahab menyebut dirinya sebagai "Muwaḥḥidūn" yang berarti pengikut tauhid, tetapi mereka umumnya lebih dikenal dengan sebutan Wahabi. Karena popularitas gerakan dan tempatnya di pusat Islam, gerakan Wahabi mengambarkan prototipe semangat fundamentalisme dalam pengalaman Islam modern[17]. Wahabisme didasarkan pada keberadaan pemikiran terahir yang membawa mereka pada puncak fundamentalisme yang militan.

Sekitar tahun 1970-an, ada dua arus besar fundamentalisme Islam. Salah satunya adalah yang nada dan organisasinya bercorak tradisional, yang merupakan kelangsungan dari garis yang terdahulu, yaitu berupa gerakan-gerakan fundamentalis militan. Bentuk fundamentalisme ini sangat jelas dalam monarki Saudi, tetapi sejumlah asosiasi fundamentalis juga terus berlanjut dalam format-format yang terlembaga dan mempertahankan pandangan-pandangan idiologis yang sejak lama didefinisikan dan ditegaskan. Pergeseran penekanan kembali pada tema-tema Islam yang murni selama

[16] *Ibid*, h.103
[17] John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, h.90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekade tersebut memberikan kemungkinan pada kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan vasibilitas dan prestise yang lebih besar, dan dibeberapa wilayah, kelompok-kelompok fundamentalis tradisional menjadi kekuatan-kekuatan sosio-politik yang penting.[18]

Disamping garis perkembangan fundamentalis tersebut, tahun 1970-an merupakan suatu periode dimana bentuk fundamentalis juga memiliki bentuk yang radikal. Fundamentalisme radikal terikat dalam suatu reorientasi tentang tradisi Islam. Radikalisme ini merupakan sintesis dari radikalisme yang telah ditransformasikan pada tahun 1960-an dan semangat fundamentalis Islam. Fundamentalis radikal menekankan partisipasi masa, kontrol partisipatori, identitas unit yang kecil dan menghilangkan perbedaan-perbedaan sosio-politik lama[19].

Pada perkembangan berikutnya, di India muncul seorang pemikir yang cukup radikal, yakni Abul A'la al-Maududi. Ia tidak hanya seorang pemikir, tapi sekaligus aktifis partai politik yang mencita-citakan berlakunya negara berdasarkan Islam. Partai yang didirikanya adalah Jemaat Islami. Oleh para pengamat barat ia digolongkan sebagai pemikir fundamentalis. Pemikir di Mesir yang juga radikal adalah Hassan al-Banna dan Sayyid Qutb. Dua tokoh ini adalah pemimpin tertinggi Ikhwan al-Muslimin, sebuah gerakan Islam

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid*, h.356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mencita-citakan berlakunya syari'at Islam di Mesir yang memiliki jaringan luas di berbagai dunia Islam[20].

3. Tipologi Moderat (Reformis dan Sintesis)

Pemikiran ini mengutarakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan yang pasti tentang masalah politik atau tata negara, namun ada prinsip atau asas yang harus ditegakkan. Memang Rasulullah S.A.W bukan diutus sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai Rasul. Perlu diketahui, konsep kerasulan beliau tidak sebatas menyampaikan pesan Allah (dakwah). Yang paling berat adalah menjadi contoh dan suri-tauladan dalam melaksanakan Islam sebagai cara hidup (*way of life*). Dalam masa yang singkat, beliau telah berhasil membuat perubahan dan reformasi kesesuaian dimana budaya, pemikiran dan sosio-politik bangsa Arab maju dan gemilang. Semua perubahan ini berlaku karena beliau telah membuat perancangan dan program yang jitu dan bijaksana. Ini dapat dilihat bagaimana beliau berhijrah, membina persaudaraan, membentuk tatanan sosial, membangun ekonomi, politik, dan sosial umat Islam di Madinah. Pengkaji-pengkaji politik Islam setuju dengan pendapat Muhammad Hamidullah yang mengatakan Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah adalah satu perlembagaan pertama di dunia karena ia dicipta di masa dunia diperintah dengan sistem monarki tidak

[20] Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperlembagaan dan tidak mengenal kedaulatan undang-undang (*supremacy of law*). Ini tentunya bukan suatu kebetulan.[21]

Penganut sistem ini memandang bahwa sistem politik Islam sebagian besarnya merupakan ijtihad, al-Qur'an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisme dan pelaksanaan lapangan. Tetapi cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu di jadikan pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam untuk membedakannya dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dan sebagainya. Selain dari pada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri ke arah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika syari'ah dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari'ah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia.

Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Din Syamsuddin mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak akan bisa berdiri tegak, pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara politik dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh

[21] Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Perkembangan Modern Dalam Islam*, h.257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract,* tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (syari'ah). Singkatnya, syari'ah memiliki peran sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik.[22]

Fazlurrahman adalah salah satu penggagas yang dinilai sementara kalangan sebagai pemikir orisinal tentang Islam. Terutama ide-ide neo-modernisme yang merupakan gagasan brilian yang hadir dalam wacana baru menggali sumber-sumber nilai Islam langsung pada pokoknya yaitu al-Qur'an. Neo-modernismenya memang selain menyuarakan kemodernan pemahaman Islam juga ditambah dengan kemampuan mengunakan metodologi sistematik tentang al-Qur'an. Begitu juga dalam pemikiran modernisme, lebih banyak mengadopsi gagasan barat dalam perspektif pemikiran barat. Sehingga ada kesan orisinalitas pemikiran Islam telah terbaratkan dalam wacana modernisme. Jadi pemikiran neo-modernisme mengambil bentuk paling mutahir baik dalam terma-terma keIslaman maupun metodologisnya[23].

Al-Qur'an dan Sunnah dinilai memuat pesan-pesan universal. Namun pesan itu tidak akan mudah ditangkap, apabila orang kehilanggan cara memahami dalam perspektif yang bersifat histories dengan mempunyai dua

---

[22] M. Din Syamsudin "*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", Dalam Abu Zahra, Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia,* h.45

[23] Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Perkembangan Modern dalam Islam*, h.258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimensi global, pertama dimensi Islam sejarah dan kedua dimensi Islam cita-cita. Jadi Islam harus ditangkap secara utuh dan mempertimbangkannya secara kritis latarbelakang sosio-kultural turunnya ayat. Apabila tidak mampu menagkapnya, maka akan kehilangan ruhnya yang berarti dalam porsoalan nilai praktis kemanusiaan dengan kehidupan kolektif. Disinilah dinamakannya esensial moral kandungan al-Qur'an mutlak diselami terlebih dahulu sebelum dengan tegas menetapkan kekuatan hukum atas suatu persoalan.

Contoh dari neo-modernisme misalnya tentang kasus perbudakan, yang tadinya sempat ditolerir oleh Islam, bahkan dijadikan beberapa persyaratan sebagai pengantian "*fidyah*" atas berlakunya pelanggaran terhadap hukum. Namun sacara bertahap perbudakan itu sendiri dihapuskan dalam nuansa hukum Islam dan tidak dibenarkan lagi memberlakukannya. Islam tidak seketika menghapus perbudakan dalam kultur masyarakat jahiliyah, namun Islam menjadikan sandaran pembersihan masalah itu dengan mengkaitkannya kepada penyelesaian hukum, untuk menghilangkan perbudakan secara perlahan namun pasti.

C. Politik Islam di Indonesia

Gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan Islam memberikan solusi baru pada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan akhir-akhir ini semakin merebak luas. Penguasaan lebih mendalam mengenai wawasan pemikiran secara filosofis, terutama penjelajahan intelektual terhadap gagasan-gagasan berfikir barat yang seakan tak terbendung lagi datangnya bagi kaum muslimin sudah dimulai sejak abad ke-21, pemikir-pemikir muslim sedang bergulat kuat untuk menemukan jati diri pemikiranya agar bisa memanfaatkan ide-ide yang merayap tak terhingga sebagai akibat modernisasi berfikir radikal yang diterapkan Barat[24].

Adanya perbedaan pemikiran tentang konsep politik dalam pengertian strategi perjuangan umat Islam Indonesia, gejala-gejalanya sangat nyata dan bahkan sebetulnya dapat dilacak akar-akarnya sejak tokoh-tokoh bangsa ini merumuskan bentuk dan dasar negara. Oleh karena itu, Indonesia kontemporer saat ini juga tak pernah sepi dari masalah tersebut, yang oleh banyak pengamat sering dikelompokkan ke dalam dua model politik Islam, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.

Sebagaimana penjabaran diatas, maka kasus di Indonesia sendiri tentang kelompok Islam fundamental yang mengambil bentuk radikal bermula dari tokoh-tokoh revivalis daerah Sumatera di awal abad ke-19 seperti Tuanku Nan Ranceh, Haji Miskin, Haji Simanik, mereka mendapat pengaruh Wahabi. Beberapa tokoh ini mendirikan semacam Dewan Revolusi yang bertujuan menegakkan hukum Syara' dan membasmi kemaksiatan serta praktek-praktek

[24] *Ibid*, h.235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syirik secara radikal seperti menyambung ayam, judi, dan membuka aurat bagi perempuan. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan Kaum Paderi yang dipelopori oleh Tuanku Imam Bonjol yang mengobarkan perlawanan dan peperangan terhadap Belanda yang mendukung Kaum Adat penentang Kaum Paderi[25].

Adapun kelompok Islam liberal di tanah air Indonesia berakar pada pemikiran dan gerakan kaum modernis di awal abad ke-20, seperti Haji Samanhudi pendiri Sarikat Dagang Islam, H.O.S. Cokroaminoto (guru Sukarno), kemudian Agus Salim, dan diteruskan oleh Sukarno, serta sebagian tokoh Masyumi. Di masa tahun 1970-an kelompok liberal dipelopori oleh tokoh-tokoh sepeti Harun Nasution dan kemudian Nurcholish Madjid dan kawan-kawan.

Pemikiran politik (fundamentalis dan liberalis) sama-sama ingin merespon kondisi kontemporer di Indonesia yang terkait dengan umat Islam. Hanya saja pendekatannya saja yang berbeda, bahkan saling berlawanan. Islam liberal menghadirkan Islam masa lalu demi modernitas. Islam liberal mengangkat tema sekitar demokratisasi, sedangkan Islam fundamentalistik yang revivalis menegaskan modernitas atas nama masa lalu yang mengangkat tema sekitar pergerakan syari'at Islam.

Relevansi Islam radikal, Islam ditawarkan sebagai kekuatan pendorong munculnya tatanan masyarakat Indonesia baru, *civil society* yang demokratis.

[25] Moh. Nurhakim, *Islam Responsif*, h.93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan relevansi Islam revivalis, Islam ditampilkan sebagai dasar sekaligus warna masyarakat Indonesia baru yang jauh dari maksiat.

Dalam pandangan politik Islam di Indonesia sendiri, ada yang beranggapan bahwa negara Indonesia menggunakan politik Islam moderat dan bahkan cenderung mengarah liberal, karena ada beberapa kalangan yang menilai bahwa bobot pemikiran para pemikir Indonesia mengarah kesana, yaitu *westernisasi*.

Banyak para Pemikir perpolitikan Islam Indonesia yang cukup mewarnai perpolitikan Indonesia. Secara umum, menurut Howard M Federspiel, ada tiga aliran pemikiran politik di kalangan kaum nasionalis Indonesia: umat Islam yang mengikuti Tjokroaminoto dan Sarekat Islam, kaum Sekularis yang dipimpin Soekarno, dan kaum Komunis yang dipimpin oleh Samaun, Tan Malaka dan Alimin.[26] Dan menyangkut masalah orientasi politik. Menurut Din Syamsuddin setidaknya ada tiga *mainstream* (arus utama) di antara pemikir politik Islam zaman sekarang. Arus yang pertama mungkin bisa disebut "formalistik", yang kedua "substantivistik", dan yang ketiga "fundamentalis".[27]

1. Arus Formalistik

Istilah di atas dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang

[26] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam,* h.107
[27] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik,* h.151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal. Dalam kontek politik, kelompok ini menunjukan orientasi yang cenderung mempertahankan bentuk pra-konsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai politik yang formal (mengunakan nama Islam), ungkapan, idiom-idiom, dan simbol-simbol politik Islam, dan terutama, landasan organisasi secara konstitusional Islam.[28]

Bagi pemikir-pemikir formalis, mereka berpendapat tentang keharusan menghidupkan kembali Piagam Jakarta bertentang dengan pancasila dan UUD 45. Karena Piagam tersebut, isinya juga mencakup Pancasila itu sendiri yang menyatu dalam pembukaan Konstitusi tersebut.

2. Arus Substantivistik

Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukan orientasi politik mereka yang menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Bagi pendukung orientasi ini, yang lebih penting adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat Indonesia modern.[29]

Gagasan-gagasan bagi penekanan Islamisasi budaya telah diperjuangkan oleh mereka yang dikenal sebagai pemikir-pemikir indigenis (pemikir yang

[28] *Ibid*, h.152
[29] *Ibid*, h.156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan pentingnya memperhatikan unsur-unsur pribumi atau lokal dalam memahami Islam), yang telah berupaya memperhatikan cita-cita Islam bagi budaya nasional Indonesia yang membedakan secara jelas antara Islam dan negara. Salah satu pencetus indigenisme ini adalah Abdurrahman Wahid. Gagasanya tentang "Pribumisasi Islam" dalam menghadapi kultur Indonesia.

Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh pemikir Islam di Indonesia. Pemikiran Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur yang mencuat ke permukaan adalah pemikiran Reformatif Modernis dan sangat jauh melesat kedepan. Dalam pikiran Gus Dur, umat Islam Indonesia tidak hanya sekedar mampu mengindonesia, tapi juga mendunia. Gus Dur menghilangkan jauh-jauh perspektif umat Islam untuk berproses dalam modernitas sekularistik, menurut beliau, umat Islam akan sanggup merakit suatu dinamika sosial keagamaan tanpa modernifikasi sekularisasi barat yang selama ini dianggapnya sudah jauh terjengkal dari tatanan pemikiran idiologi modern[30].

Gus Dur mempunyai alternatif lain dalam upaya pendekatan terhadap upaya aplikasi nilai-nilai Islam, yaitu apa yang disebut pendekatan sosial-budaya. Pendekatan ini sedikit radikal, yaitu akan sedikit mengadakan perombakan terhadap struktur yang ada. Walaupun demikian menurutnya sangat tidak mungkin dilakukan. Di sisi lain diperlukan dialog terbuka dan saling belajar dengan menyelami sejumlah pendekatan-pendekatan yang dimksud. Menurut Gus Dur, pengintegrasian (pengabungan) wawasan Islam

[30] *Ibid* h.251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan kepada pemerintah, tetapi kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi Islamisasi birokrasi itu cenderung tidak lebih berbeda dengan cara-cara umat Islam terdahulu yang sering mendompleng kepada kekuasaan dan kekuatan untuk menerapkan wawasan nilainya dan menampilkan wajah Islam.

Pada dasarnya, gagasan besar Abdurrahman Wahid lebih diletakkan pada upaya membangun pemikira liberal mengenai agama, negara dan masyarakat. Menurut Greg Barton sejak membangun kepemimpinan Nahdlatul Ulama', pemikiran Gus Dur sudah kelihatan liberal dan progresif. Dalam merespon derasnya arus modernitas, Gus Dur lebih banyak bersikap positif dan fleksibel. Bagi Gus Dur, watak pluralistik dan multi-komunal mesyarakat Indonesia modern harus di hormati dan dipertahankan dari kecenderungan-kecenderungan sektarianistik. Penolakan terhadap sektarianistik adalah bagian dari keseluruhan ide Gus Dur terhadap pentingnya penghormatan atas realitas yang terjadi dalam masyarakat[31].

Gus Dur beranggapan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan serta kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam.

Jadi, dapat digaris-bawahi bahwa pandangan Gus Dur ini sangat substantivistik, artinya ia tidak mempersoalkan bentuk operasional pemerintahan, asalkan sesuai dengan kenyataan yang berkembang. Dengan

[31] Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, h.99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan lain, bentuk yang paling tepat adalah bentuk yang paling mungkin digunakan, bukannya bentuk-bentuk "*utopis*" yang ditawarkan melalui idealisasi sebuah konstruk Islami.

Sedikit berbeda dengan pandangan Nurcholis Madjid. Seorang pemikir dengan program pembaharuan, beliau berupaya menawarkan pemikiran yang lebih substansial dan lebih sistematik. Selogan beliau "Islam yes, partai Islam no" dan pandangan tentang Islam sebagai faktor komplementer bukanlah titik pangkal pemikiranya, tapi lebih sebagai catatan kesimpulan dari renungannya atas Islam dan historisitas umat Islam di Indonesia. Ia menemukan bahwa sebagai agama fitrah yang menekankan potensi-potensi yang inheren dalam diri manusia dalam kebebasan dan kebaikan. Islam adalah agama universal yang mengajarkan cita-cita kemanusiaan universal, yang mengajarkan inklusivisme, bukan eksklusivisme.[32]

Menurut Nurcholis Madjid**.** Apa yang dimaksud modernisasi tidak lain adalah tuntutan mutlak terhadap nasionalisasi dalam semua dimensi kehidupan. Modernisasi identik dengan rasionelisasi, bahkan modenisasi itu sendiri bagi seorang muslim merupakan keharusan mutlak dan wajib ditaati karena merupakan ajaran dan perintah Tuhan. Menurut Cak Nur pemodernan atau modernitas itu adalah suatu ajaran Islam itu sendiri. Islam mempunyai ajaran tentang *fitrah* (memiliki konsep kebenaran), dan *hanif* (mempunyai kecenderungan untuk mengali dan menemukan kebenaran), dalam mencari

[32] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h.158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menemukan kebenaran itu, salah satu ukuran yang harus dimiliki adalah rasionalitas. Karena seorang muslim memiliki asas kebenaran, maka untuk memenuhi dan menemukan kebenaran itu dituntut kerja rasional yaitu menggunakan batas-batas akal secara maksimal[33]

Walaupun demikian kemodernan itu sendiri karena diciptakan dan dibikin oleh manusia, maka sifatnya relative. Saat ini sesuatu boleh dikatakan modern, namun pada suatu masa akan datang mungkin sudah kolot dan ketingagalan zaman. Yang modern yang mutlak itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ringkasnya, modernitas itu berada dalam satu proses panjang dan tidak berkesudahan, kecuali pada sampai titik prima dan puncak keabadian, yaitu Yang Maha Mutlak itu sendiri, Allah.

Cak Nur tidak memberikan interpretasi yang mengatakan kemodernan itu merupakan bentuk sekularisme, karena Cak Nur mempunyai pandangan agak *nyleneh* tentang pengunaan istilah itu. Islam membedakan secara prinsip sekularisme dan sekularisasi. Islam tidak pernah menolak sekularisasi, hanya menolak sekularisme. Karena sekularisme bertujuan memisahkan total kepentingan agama dan negara, paham tertutup dan penolakan pada adanya kehidupan selain duniawi. Sedangkan sekularisasi mempunyai kecenderungan hanya kepada sikap sosiologis, berupa pembebasan masyarakat dari belenggu takhayul dalam berbagai aspeknya.

[33] Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Perkembangan Modern dalam Islam*, h.242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada yang menafsirkan bahwa Nurcholish Madjid sejak tahun 70-an telah menyarankan sekularisasi. Bagi Cak Nur, Islam tidak lebih dari sekadar agama seperti agama-agama lain yang wujud di dunia. Atas dasar ini, agama perlu dibedakan dan dipisahkan dari politik. Oleh karena itu, menurut Nurcholish tidak ada politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam dan sebagainya. Baginya negara hanyalah bagian dari aspek keduniaan yang bergantung sepenuhnya kepada nalar dan masyarakat, sedangkan agama berasal dari alam ghaib yang hanya berdimensikan spiritual dan personal.

3. Arus Fundamentalis

Istilah ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang, yang titik pangkalnya berkeyakinan bahwa kedua mainstream yang lain telah gagal menunjukan Islam sebagai keseimbangan-tandingan dalam meresponi sistem politik Indonesia. Golongan ini menekankan kembali ke al-Qur'an dan Sunnah.[34]

Salah satu pemikir fundamentalis Indonesia adalah Cokroaminoto. Pandangan beliau tentang konsep kenegaraan berangkat dari pemahaman bahwa Islam merupakan model yang terbaik untuk mengatur kehidupan manusia. Beliau menganggap bahwa al-Qur'an itu sudah mencakup semua aspek kehidupan manusia. Maka apabila kaum muslimin menjalankan

[34] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h.160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, sudah pasti mendapatkan keluhuran derajat.[35]

Selanjutnya Cokroaminoto mengatakan *"Menginggat apa-apa yang telah nyata kejadian sejarah, teristimewa sekali menginggat perbuatan dan perjalanan Rasulallah. Itu merupakan contoh yang paling utama bagi umat Islam. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, satu dari pada syarat utama ialah : tak boleh tidak kita kaum muslimin mesti mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan kebangsaan dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri".*

Beliau menyatakan bahwa segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan harus dibicarakan MPR sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan. Di dalam Islam menurutnya, Nabi Muhammad adalah yang pertama kali mendirikan dan memerintah suatu negara yang berdasar sosialisme. Dan untuk era sekarang, dalam mengahadapi kemajuan teknologi pada zaman modern ini, menurut Cokroaminoto cukuplah al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi segala hukum yang dibuat. Dalam pandangan Ahmad Hassan sendiri, politik merupakan alat untuk mencapai cita-cita umat Islam. Politik merupakan bagian dari tugas agama. Lebih jauh Ahmad Hassan menjelaskan bahwa agama tidak terbatas pada akidah dan ibadah, tetapi juga berjuang dalam medan politik agar mencapai kemenangan idiologi Islam.[36]

---

[35] AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, h.144
[36] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MENURUT AHMAD HASSAN

A. RIWAYAT HIDUP AHMAD HASSAN

1. Sketsa Biografis Ahmad Hassan

Ahmad Hassan dilahirkan di Singapura pada tahun 1887. Dengan nama kecilnya Hassan bin Ahmad, beliau terlahir dari pasangan seorang Bapak bernama Ahmad dan Ibu yang bernama Muznah, yang mempunyai asal-usul dari Mesir. Mereka menikah di Surabaya, yaitu ketika Ahmad sedang melakukan perjalanan perdagangan di kota Padang. Setelah menikah, Ahmad memboyong Muznah ke Singapura, meskipun Muznah lahir di Surabaya, Muznah berasal dari Pelakat, Madras.[1] Sedangkan Ahmad sendiri berasal dari India dan bergelar Pandit.

Ayah Ahmad Hassan adalah pengarang dan pemimpin surat kabar "Nurul Islam" yang terbit di Singapura.[2] Ayah Ahmad Hassan adalah orang yang ahli dalam bahasa dan agama, dan ia tak jarang terlibat dalam perdebatan mengenai dua persoalan itu (bahasa dan agama). Di dalam surat kabarnya Ahmad mengasuh rubrik Tanya-Jawab.

Semasa hidupnya, Ahmad Hassan hanya mempunyai seorang istri yang bernama Maryam, yang dinikahinya di Singapura pada tahun 1911.

---

[1] Harry Muhammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20,* h.14
[2] AH. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, h.146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maryam adalah seorang peranakan Tamil-Melayu, dari keluarga yang taat beragama. Dari pernikahannya itu, pasangan Ahmad Hassan-Maryam dikaruniai 7 anak. Satu diantaranya adalah Abdul Qadir Hassan, yang juga penerus ayahnya. Pada tahun 1940, Ahmad Hassan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, untuk mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Persis. Dan pada tanggal 10 November 1958, Ahmad Hassan menghadap pada-Nya. Allah.[3]

2. Pendidikan Ahmad Hassan

Sebagai anak laki-laki, ayahnya juga menginginkan Ahmad Hassan apabila besar nanti menjadi seorang penulis sepertinya juga. Untuk maksud itu, dia berusaha memberi pendidikan secukupnya kepada Ahmad Hassan. Dan suatu keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada Ahmad Hassan, dalam usia 7 tahun, dia sudah mulai mempelajari al-Qur'an dan pengetahuan asas dalam bidang agama. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, kedua pelajaran ini dapat diselesaikannya dalam tempuh dua tahun. setelah itu Ahmad Hassan masuk sekolah Melayu selama 4 tahun dan mempelajari bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Inggris.

Ibarat pepatah, "buah jatuh tak jauh dari pohonya". Begitu pula dengan Ahmad Hassan, rupanya beliau juga mewarisi tradisi intelektual ayahnya. Sejak usia dini Ahmad Hassan belajar pada gurunya dengan cukup antusias.

[3] Harry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20*, h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara formal, Ahmad Hassan tidak pernah benar-benar menamatkan pelajarannya di sekolah dasar yang ditempuhnya di Singapura itu, karena pada usia 12 tahun Ahmad Hassan sudah ikut berdagang, menjaga toko iparnya yang benama Sulaiman. Sambil berdagang, Ahmad Hassan memperdalam ilmu agamanya pada Haji Ahmad di Bukittiung dan Muhammad Thaib di Minto Road. Haji Ahmad bukanlah seorang alim besar , tetapi buat ukuran Bukittiung ketika itu, ia adalah seorang guru yang disegani dan berakhlak tinggi. Pelajaran yang diterima Ahmad Hassan sama saja dengan apa yang diterima anak-anak muda waktu itu, yakni bagaimana cara sembahyang, wudlu', puasa dan lain-lain.

Ahmad Hassan mempelajari ilmu nahwu dan sharaf pada Muhammad Thaib. Ahmad Hassan sebagai seorang yang keras kemauannya dalam belajar ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan sharaf, tidak merasa keberatan menerima segala persyaratan yang diperuntukan baginya. Persyaratan itu antara lain: *pertama,* Ahmad Hassan harus datang pagi-pagi sebelum sembahyang shubuh. *Kedua,* Ahmad Hassan tidak boleh naik kendaraan ke tempat gurunya itu. Setelah kira-kira empat bulan belajar nahwu dan sharaf, ia merasa bahwa pelajarannya tidak mendapat kemajuan. Namun apa yang disuruh gurunya dikerjakan dan dihafal juga, tanpa dimengerti, ahirnya semangat belajanya menurun. Dalam keadaan demikian, untunglah gurunya tersebut pergi haji dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau beralih belajar pada Sid Abdullahal Masnawi. Beliau semata-mata belajar bahasa arab dan menempuhnya selama waktu tiga tahun.[4]

Di samping itu, beliau belajar agama pada Abdul Lathif, seorang yang terkenal di Malaka dan Singapura, ia belajar pula pada Syekh Hassan seorang yang berasal dari Malabar, dan Syekh Ibrahim, ulama' yang berasal dari India. Semua itu di tempuh kira-kira tahun 1910, ketika ia berusia 23 tahun. Ahmad Hassan pada waktu itu belum memiliki pengetahuan luas tentang agama, misalnya fara'id, fiqh, mantiq, dan lain-lainya, tetapi dalam ilmu alat yang dimiliki itulah ia memperdalam pengetahuan agamanya.

3. Pekerjaan Ahmad Hassan

Pada masa remaja, Ahmad Hassan sudah mencari nafkah dari pelayan toko sampai membuka Volkanisir Ban. Beliau pun tetap rajin menuntut ilmu, dan setelah ilmunya dirasa cukup, pada tahun 1910, Ahmad Hassan mengajar di Madrasah, dari tingkat Ibtidaiyyah sampai Tsanawiyah.

Pada tahun 1912, Hassan bekerja di *Utusan Melayu* yang diterbitkan oleh Singapore Press. Ahmad Hassan menulis artikel yang berisikan nasehat-nasehat, mengajak pada kebaikan, dan menjauhi kemungkaran. Tidak jarang Ahmad Hassan menulis dalam bentuk puisi yang cukup mengelitik dan menyentuh.[5]

---

[4] Syafiq A Mughni, *Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, h.12
[5] Harry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20*, h.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembanganya, tulisan Ahmad Hassan mulai menemukan bentuknya. Yakni punya sikap yang tegas terhadap persoalan yang menurut dia masuk ke wilayah prinsip. Ahmad Hassan, misalnya, mengecam keras terhadap *Qadli* (hakim) yang memeriksa perkara dan mengumpulkan pria dan wanita di tempat duduk yang sama. Di surat kabar ini Ahmad Hassan bekerja sampai tahun 1916.

Suratan takdir Ahmad Hassan rupanya tidak hanya bermukim di Singapura. Pada tahun 1921, Ahmad Hassan berangkat ke Surabaya, mengelola toko milik paman yang sekaligus gurunya, Abdul Lathif. Sebelum berangkat, Abdul Lathif berpesan pada sang keponakan, jangan bergaul dengan Faqih Hasyim yang dianggap sesat karena berfaham Wahabi. Rupanya di Surabaya waktu itu sedang terjadi konflik antara kaum muda yang dipelopori oleh Faqih Hasyim, seorang padagang yang sekaligus pendakwah. Faqih Hasyim, yang berasal dari Padang itu, mengunakan rujukan dari buku-buku yang dikarang oleh Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, dan Zainuddin Labay, ketiganya asal Sumatra.

Ahmad Hassan datang ke Surabaya, awalnya, semata-mata hanya sebagai pedagang. Ia tinggal dirumah pamannya yang lain, Abdullah Hakim. suatu hari, sang paman meminta agar Ahmad Hassan menemui K.H. A Wahab Hasbullah. Belakangan, Kiai Wahab menjadi terkenal karena ia adalah salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama' pada tahun 1926. Namun pada akhirnya Ahmad Hassan berkesimpulan bahwa kaum muda yang ada di Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di jalan yang benar. Kesimpulan itu ia dapat setelah berbincang-bincang dengan Kiai Wahab. Maka ia pun bersahabat dengan Faqih Hasyim yang mewakili golongan muda.

Pada perkembangan selanjutnya, karena Ahmad Hassan tertarik pada ilmu menenun, pada tahun 1924 Ahmad Hassan pergi ke Bandung. Tujuannya hanya satu, memperdalam ilmu pertenunan selama 9 bulan. Ia tinggal bersama keluarga Yunus, seorang pendiri Persis. Usai sekolah tenun, Ahmad Hassan sempat dipercaya mengelola pabrik tenun selama satu tahun. Tapi karena kesulitan bahan dasar atau bahan baku, pabrik tersebut akhirnya ditutup pada tahun 1926. Selama di Bandung inilah Ahmad Hassan sering ikut aktifitas di Persis, dan secara resmi manjadi anggota pada tahun 1926. Hassan masuk Persis ketika Ormas Islam ini berusia 3 tahun. Dan rupanya, beliau segera popular dikalangan kaum muda yang progresif. Tahun-tahun berikutnya, Ahmad Hassan identik dengan Persis, begitu pula Persis, identik dengan Ahmad Hassan.

4. Pengaruh Terhadap Pikiran Ahmad Hassan

a. Pengaruh Turunan

Perkembangan alam pikiran dan sikap seseorang tak bisa lepas dari pengaruh hubungan seperti keluarga, pergaulan, dan bacaanya. Begitu pula Ahmad Hassan. ketika masih di Singapura, diusianya yang masih belia, ia sering melihat ayahnya, sesudah mengubur jenazah langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulang. Tak ada acara *talqin*, *tahlil* dan sebagainya. Begitu pula ketika mau melaksanakan shalat, tak ada *ushali* (niat dalam shalat). Selain dari ayahnya, Ahmad Hassan juga dipengaruhi oleh tiga ulama' asal India. Mereka adalah Thalib Raja Ali, Abdurrahman, dan Jaelani. Tiga orang ini, bersama ayahnya, dikenal berfaham Wahabi[6].

Di awal aktifitasnya, gerakan Wahabi tak jarang mengunakan aksi kekerasan, dalam bentuk merobohkan bangunan-bangunan yang dipakai untuk akatifitas yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu, gerakan ini tak segan-segan untuk menghancurkan kuburan para sahabat Nabi, karena telah dinilai telah digunakan sebagi pemujaan. Ahmad Hassan sendiri terpengaruh pada sikap dan semangat membersihkan noda syirik dari kalangan Wahabi ini. Adapun caranya, Hassan lebih suka melakukanya dengan cara berdebat secara langsung, atau menulis dalam bentuk artikel atau buku.

b. Pengaruh Bacaan

Bacaan yang ikut mempengaruhi jalan fikiran beliau antara lain majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Majalah Al-Iman yang mula-mula dipimpin oleh al-Hadi kemudian Thahir Jalaluddin. Thahir Jalaluddin dikenal sebagai pembawa faham baru, dan Hassan pun mendengarnya

[6] Wahabi adalah istilah yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791). Abdul Wahab sendiri dikenal sebagai ulama yang mengadakan pemurnian ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai seorang yang mengubah agama.[7] Selain itu, Ahmad Hassan mendapat buku "*Kafa'ah*", tulisan Ahmad Surkati, yang mengeluarkan fatwa bahwa muslim dengan muslimah boleh kawin tanpa memandang golongan dan derajat. Dan ketika di Surabaya, beliau melihat buku karangan Ibnu Rusyd "*Bidayatul Mujtahid*" pada saat betemu di rumah sahabatnya Bibi Wabte.[8]

c. Pengaruh Pergaulan

Pada waktu di Singapura, selain mendapat pengaruh ayahnya, beliau juga bergaul dengan salah seorang guru dari mesir yang sama-sama mengajar di sekolah Assegaf. Dalam bebarapa kali pertemuan Hassan mencium tangan seseorang yang tergolong *sayyid.* Kemudian Pada waktu makan malam di rumah kawanya itu Hassan di caci-maki, karena sikapnya dianggap menghinakan diri terhadap sesama manusia. Hal ini mendorong Hassan menulis dalam "*Utusan Melayu*" tentang mencium tangan.[9]

Pada waktu di Surabaya, beliau bergaul akrab dengan Faqih Hasyim serta menghadiri pertemuan-pertemuan al-Irsyad di bawah bimbingan Ahmad Surkati. Dan pada waktu di Bandung, ia bergaul akrab dengan Muhammad Yunus dan Zamzam, pendiri Persatuan Islam.[10]

---

[7] Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, h.20
[8] *Ibid,* h.21
[9] *Ibid,* h.21
[10] *Ibid,* h.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PEMIKIRAN AHMAD HASSAN TENTANG ISLAM

Agama Islam menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia, namun diantara mereka ada yang melaksanakan ajaran agama dan ada pula yang sebaliknya. Golongan yang taat agama, melaksanakan ajaran agamanya seperti sembahyang lima kali sehari, membayar zakat, berpuasa dan naik haji. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran agama. Apabila pesoalanya menyangkut orang yang tidak mengaku beragama Islam, maka jelas mereka adalah kafir. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah, bila orang tesebut mengaku beragama Islam, sedangkan ia tidak memiliki ciri sebagai seorang muslim[11].

Ditambah oleh kenyataan bahwa pengamalan ajaran Islam masih bercampur dengan ajaran-ajaran lain dan faham keagamaan mereka dipandang belum sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, yang berarti pula menentang segala bentuk kepercayaan takhayul, khurafat, dan bid'ah.

Berangkat dari pemahaman diatas, pembahasan tentang pemikiran Ahmad Hassan tentang Islam secara umum akan dikaji. Namun pada dasarnya, pemikiran Ahmad Hassan tentang Islam sangat banyak sekali, maka dari itu penulis akan membatasi dan mengutip beberapa atau sebagian saja dari pemikiran Ahmad Hassan. Diataranya terkait dengan (1) Tuhan dan sifat-

[11] Syafig A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal,* h.1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya, (2) Tuhan sang pemberi hukum, (3) Kenabian (*An-Nubuwwah*), (4) al-Qur'an dan Hadits.[12]

1. Tuhan dan Sifat-sifat-Nya

Tentang hakekat Allah dan hubungan manusia dengan-Nya, beliau mengatakan bahwa, jika ilmu agama dianggap suci karena mengandung hukum-hukum Allah, maka ilmu tauhid lebih suci (dan bahkan tidak ada perbandingan yang nyata) karena isinya membahas sifat-sifat Allah yang mewahyukan agama itu. Pemahaman yang tepat mengenai sifat Allah begitu penting bagi semua umat Islam, sehingga mereka bisa mencapai hubungan yang benar dengan Allah. Dengan mendalami pengetahuan tentang sifat Allah, muslim yang terdidik menjadi sadar akan kebesaran Allah dan sadar akan kebodohan mentaati wujud selain Allah. Sementara itu, pemahaman yang tidak tepat, menyebabkan manusia menyalahi dan melanggar perintah-perintah Allah. Misalnya pemujaan terhadap orang suci dilakukan oleh orang Kristen dan sebagian umat Islam lainya, dan praktek-praktek orang Jawa berkonsultasi dengan dukun untuk malakukan sesaji dan pemujaan. Hal demikian dinilai oleh Ahmad Hassan sebagai tindakan yang mengabaikan kekuasaan Allah dan bertentangan dengan perintah Allah. Beliau menyimpulkan bahwa untuk keselamatan spiritual dan pahala abadi mereka

[12] Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, h.158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, maka umat Islam harus belajar dan berusaha untuk memahami sifat Allah.[13]

2. Tuhan Sang Pemberi Hukum

Ahmad Hassan berkeyakinan bahwa, sebagai pengatur dan pemelihara alam semesta, Tuhan telah menetapkan aturan-aturan dan pola-pola standar yang dikenal manusia sebagai hukum. Hukum agama (syari'at) megatur hubungan manusia dengan Tuhan agar manusia menjadi bertakwa. Hukum buatan manusia, membentuk hubungan dan keterkaitan manusia dengan sesama manusia lainya, serta mengatur perkembangan dan setatus masyarakat.

Hukum agama, merupakan hukum yang paling penting. Karena "menyembah Allah", berarti merendahkan diri kita dengan maksud melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Tujuan dari hukum agama adalah menguraikan perintah dan kehendak Tuhan agar manusia dapat melaksanakannya, karena tanpa hukum agama, tidak akan ada cara yang nyata untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan. Karena alasan itulah Allah memberi manusia hukum agama dalam bentuk al-Qur'an dan Hadits sebagai petunjuk dan tuntunan.[14]

Ahmad Hassan menjelaskan bahwa selain diatur oleh hukum agama, manusia juga diatur oleh hukum alam, yang dibagi oleh beliau menjadi dua bagian, yaitu hukum yang bisa diterima oleh nalar, dan hukum yang diterima

[13] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam,* h.37
[14] Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim,* h.164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh adat kebisaaan. Contoh hukum yang diterima oleh nalar adalah, mustahil bila "seorang ayah pasti lebih tua dari anaknya", dan sebaliknya adalah mustahil bila "seorang anak lebih tua dari ayahnya". Adat merupakan suatu yang mirip dengan hal-hal yang diserap nalar, dan ia diperoleh umat manusia. Sehingga Ahmad Hassan berkesimpulan bahwa hukum itu tidak lain harus dipatuhi. Dan pada umumnya, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikanya.[15]

3. Kenabian

Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia baik dalam masalah dunia maupun akhirat. Ahmad Hassan mengatakan dengan pengambilan dasar al-Qur'an dan Hadits Sahih dan argument-argument yang ia kemukakan tidak hanya diterima oleh imam, tetapi juga dalil yang sebenarnya mampu menghadapi tantangan akal dan penelitian. Ahmad Hassan menjelaskan sifat dan karakteristik umum kenabian dalam tradisi Sunni kemudian mengambarkan secara garis besar bahwa kehidupan Muhammad memenuhi persyaratan ini. *An-Nubuwwah* adalah studi yang sangat idealis tentang Muhammad, dan sengaja di tulis sebagai jawaban terhadap kritik golongan nasionalis sekuler dan sebagian orang Kristen.

Ahmad Hassan menyatakan bahwa manusia tidak mampu mengetahui dengan kemampuan-kemamapuan mentalnya apa yang mejadi tujuan Tuhan

[15] *Ibid*, h.166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menempatkan manusia di muka bumi. Untuk memberikan bimbingan yang suci kepada manusia, Tuhan telah mengutus Nabi dengan kitab sucinya untuk menjelaskan tujuan Ilahiah dan menetapkan kewajiban-kewajiban umat manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan makhluk-mahkluk. Ahmad Hassan menjelaskan bahwa al-Qur'an mencantumkan 25 Nabi dan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terahir. Hal ini menegaskan penolakan Ahmad Hassan terhadap keyakinan Ahmadiyah Qodiyan bahwa pendiri mereka adalah seorang Nabi. Ahmad Hassan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada, dan tidak akan pernah ada Nabi-nabi lain setelah Nabi Muhammad.[16]

4. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Hadits sangatlah penting bagi Ahmad Hassan dan Persatuan Islam, karena sudut pandang muslim fundamentalis menekankan bahwa sumber-sumber ini menyajikan Islam dalam bentuknya yang murni dan dalam bentuk itu dapat diadaptasikan dengan kondisi-kondisi dan konsep-konsep yang berlaku di dunia modern. Seperti halnya Rasyid Ridha, Ahmad Hassan menuduh ulama' tradisionalis telah melupakan dua sumber ini, dan secara salah menekankan penafsiran-penafsiran para Juris dan teolog Islam.[17]

Menurut pengamatan Ahmad Hassan, para ulama' hadits membagi hadits menjadi dua bagian, yakni yang boleh dipakai dan yang tidak. Hadits yang

[16] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, h.44
[17] *Ibid*, h.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dipakai, dibagi menjdi dua bagian, yaitu *Mutawatir* dan *Ahad. Mutawatir* ialah hadits yang di dengar dari Nabi oleh banyak orang, lalu disampaikan kepada orang banyak, sampai tercatat di kitab hadits. Sedangkan hadits *Ahad* ialah hadits yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang-orang yang tidak sebanyak hadits *Mutawatir*.[18]

Menurut Ahmad Hassan, hadits yang tidak boleh dipakai dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang lemah riwayatnya dan yang palsu riwayatnya. Kedua macam hadits ini tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum halal, haram, sunnat atau makruh. Ia hanya boleh dipakai untuk membantu keterangan saja, bukan jadi pokok pedoman.[19]

C. PEMIKIRAN AHMAD HASSAN TENTANG POLITIK ISLAM

Jarang seorang ulama' yang didapati begitu rajin bekerja dan sungguh-sungguh menyediakan dirinya untuk jihad membela dan menyiarkan agama dengan lisan dan tulisanya secara berani dan penuh tanggung-jawab. Hidup sendiri sebagi ulama pengarang, dan tanpa mengharap bantuan orang lain. Sifat kemanusian yang tinggi sangat mempengaruhi orang-orang yang mengenalnya. Seorang yang sangat memuliakan tamu dan setiap surat yang datang dari siapapun pasti dibalasnya.[20]

---

[18] Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, h.25
[19] *Ibid*, h.25
[20] Abdullah Rahman Abdullah,*Gerakan Islam di Perlis*, h.132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidaklah berlebihan kiranya jika penulis memuji sifat dan kepribadian serta karakter yang kuat dari sosok Ahmad Hassan yang begitu luar biasa, begitu bersahaja. Sehingga penulis semakin tertarik untuk lebih mengenal beliau lewat karya-karyanya dalam bentuk tulisan-tulisan.

Ruang lingkup perhatian, kegiatan serta kajian tentang Ahmad Hassan sebenarnya sangat luas sekali, yang meliputi berbagai kehidupan dan penghidupan manusia dalam kaitannya dengan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Ruang lingkup pandangan Ahmad Hassan yang luas itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan secara sistematis sebagai berikut:

a. Mengenai Muhammad Rasulallah.
b. Mengenai sumber norma dan nilai Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah
c. Mengenai akidah
d. Mengenai syari'ah
e. Mengenai akhlak
f. Mengenai studi Islam. Seperti ilmu tauhid dan ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dan lain-lainnya
g. Mengenai soal hidup lainnya. Seperti politik, ekonomi, sosial, kesenian, ilmu pengetahuan, filsafat, bahasa, perbandingan agama dan lain-lainya.[21]

Menurut Syafiq A. Mughni, pendapat dan fikiran Ahmad Hassan dapat digolongkan dalam empat masalah pokok, yaitu pandangan tentang (a)

[21] Abdul Rahman Abdullah, *Gerakan Islam Di Perlis*, h.131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum Islam (b) ijtihad, ittiba' dan taqlid (c) bid'ah (d) faham kebangsaan.[22]

Namun secara spesifik penulis akan membatasi tentang kajian terhadap beliau, Ahmad Hassan. Yaitu tentang kajian politik Islam menurut Ahmad Hassan. Tentang pandangan Ahmad Hassan terhadap pemerintahan Indonesia, tentang negara Islam itu sendiri dan undang-undang berdasar Islam. Selain dari beberapa tulisan dan karangan buku Ahmad Hassan sendiri tentang politik Islam, pemikiran beliau bisa terlacak juga di gerakan Persis (Persatuan Islam), karena beliau adalah tokoh sentral dalam Persis.

1. Negara Menurut Ahmad Hassan

Prinsip dasar keyakinan Ahmad Hassan dalam mewujudkan suatu negara Islam yang sesuai dengan yang di kehendaki Tuhan. Maka, *pertama,* kaum muslimin harus melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan. *Kedua,* menempatkan umat Islam pada ajaran Islam yang murni berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam akidah (kepercayaan dan keyakinan) maupun syari'at (hukum agama).[23]

Sistem kehidupan atau bentuk negara dalam pandangan Ahmad Hassan yaitu: *pertama,* adanya jama'ah (kehidupan yang bersatu). *Kedua,* mempunyai pemimpin (*imama*), dan *ketiga,* mempunyai kekuasaan (*imarah*).

[22] Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal,* h.24
[23] *Ibid,* h.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga unsur tersebut di atas menurut beliau, hal itu sebagaimana telah di contohkan oleh Rasulallah.[24]

Pemikiran Ahmad Hassan di atas sejalan dengan corak pemikiran kaum fundamentalis pada umumnya. Ada empat ciri utama negara Islam, yaitu: *pertama,* kedaulatan ada di tangan Tuhan. *Kedua,* hukum tertinggi dalam negara adalah syari'ah. *Ketiga,* pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Nya. *Keempat,* pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah diterapkan oleh Tuhan.[25]

Konsep kenegaraan seperti di atas haruslah diterapkan dalam suatu bangsa. Walaupun mendukung pemimpin-pemimpin Republik Indonesia sekuler, tetapi Ahmad Hassan tidak putus asa untuk mendirikan sebuah negara Indonesia yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam *Falsafah Perjuangan Islam*, yang ditulis pada tahun 1949, ia mencatat bahwa umat Islam berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan untuk membangun negara dalam keridhoan Allah untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai umat Islam. Negara yang diperjuangkan oleh umat Islam menurut Ahmad hassan yaitu mengatur dan memberi bimbingan mengenai kebenaran dasar umat manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial.[26]

---

[24] *Ibid,* h.59
[25] Yuzril Ihza M, *Modernisme* dan *Fundamentalisme dalam Politik Islam*, h.241
[26] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam,* h.153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perkembangan selanjutnya, sebelum Indonesia merdeka ada beberapa pergerakan yang berjuang menuju tercapainya kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada yang berasaskan kebangsaan, yakni semata-mata untuk kepentingan bangsa tanpa menjadikan agama tertentu sebagai pandangan politik dan sumber inspirasi. Di fihak lain ada yang sebaliknya, yaitu perjuangannya berdasar dan bercorak agama tertentu. Pihak pertama tidak menghendaki dan bahkan melarang orang melibatkan agama dalam segala pembicaraan umum, serta tidak menghendaki Islam dijadikan dasar suatu bangsa meskipun mereka itu sebagai pemeluk Islam. Inilah yang oleh Ahmad Hassan disebut golongan "netral agama".[27]

Hassan memandang sikap ini sebagai penyempitan langkah mempersatukan bangsa Indonesia, karena pada hakekatnya, sikap ini mengarah pada benci agama. Ia menerima sikap netral agama itu jika diartikan sebagai suatu sikap memberi kesempatan orang untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ahmad Hassan menganggap kenyataan saat itu menunjukan bahwa faham kebangsaan dipakai oleh pergerakan yang bersikap tidak tahu menahu agama mereka untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya akan dilaksanakan hukum-hukum Islam.

Dalam pandangan Ahmad Hassan, ide sekularisme sungguh berbahaya, terutama hubungannya antara Islam dan paham kebangsaan atau

[27] *Ibid*, h.32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasionalisme. Paham kebangsaan awalnya muncul dan berkembang di Eropa, lalu pada abad-20 masuk ke Indonesia, dibawa oleh Dr. Soetomo dan Ir. Soekarno. Paham kebangsaan ini mengusung ideologi "asli" Indonesia yang dalam implementasinya menjauhkan dari hal-hal yang berbau asing, termasuk unsur-usnur agama yang sudah berabad-abad dijalani umat Islam.[28]

Ahmad Hassan, mungkin karena dia bukan orang Indonesia yang lahir sebagai pribumi, tetapi mungkin juga karena alasan-alasan doktrinal, mengangap identifikasi internasional persaudaraan muslim sebagai hal penting. Dia mendukung Pan-Islamisme (persatuan Islam), dalam arti, beliau percaya bahwa kaum muslimin diseluruh dunia memiliki kewajiban untuk melenyapkan kekuatan asing dari seluruh belahan dunia Islam, dan setiap muslim dapat berjuang untuk tujuan ini di negara manapun dia tinggal. Akibatnya, Ahmad Hassan menolak nasionalisme yang dikembangkan oleh kelompok Soekarno dan Soetomo karena menempatkan tujuan-tujuan nasional lebih tinggi dari pada agama yang menciptakan perpecahan dalam komunitas muslim.[29]

Kaum sekuler menyatakan bahwa Islam tidak bisa menjadi dasar bagi gerakan nesionalis bersatu karena orang-orang Kristen, Hindu, Budha bahkan orang-orang "*animis*" juga terlibat dan tidak akan mendukung suatu gerakan yang memenangkan Islam dan menempatkan mereka pada posisi mengabdi.

[28] Harry Muhammda dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20*, h.18
[29] Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim,*h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekularisme, kata kaum sekuler merupakan kompromi logis, karena tidak akan memenangkan dan mengarah pada salah satu kelompok manapun juga, tetapi memperkenankan setiap orang untuk mengikuti prinsip-prinsip dan kewajiban-kewajiban agamanya sendiri.

Poin lain dari friksi dalam gerakan nasionalis Indonesia di tahun 1930-an adalah pandangan sekularis tentang Islam sebagi agama yang hampir mati, yang mendewakan kegemilangan masa lampau yang hilang. Maka dari itu, bangsa kita tidak mampu memberikan jawaban-jawaban bagi masalah-masalah modern. Menurut Soekarno, "*kiai*" sering tidak memiliki perasaan atau sentuhan dalam sejarah dan mengacaukan masa lampau dengan masa kini, bahwa mereka terlalu kolot.

Kaum sekularis mengatakan bahwa masa lampau umat Islam tidak bisa diraih kembali, dan untuk itu, budaya baru dibutuhkan untuk mengambil tempatnya di dalam sejarah. Menurut Soekarno, masyarakat membutuhkan perkembangan, dan tidak menginginkan untuk kembali ke belakang. Terpuruk dan jatuh.[30]

Hassan tampil menolak paham kebangsaan yang di usung oleh kedua pelopor pergerakan Indonesia itu (Soetomo-Soekarno). Menurut Ahmad Hassan, paham kebangsaan Soekarno dan Soetomo itu sama dengan '*ashabiyyah*, fanatik kesukuan yang oleh Islam sangat ditentang[31]. Menurut

[30] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Abad-20*, h.119
[31] Harry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20*, h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Hassan, kaum nasionalis sekuler hanya mengetahui sedikit tentang Islam sehingga, tentu saja tidak memahaminya, dan benar-benar meniru pemisahan Gereja dan negara sebagaimana dipraktekkan di Eropa, padahal semangat dan isi al-Qur'an sesuai dengan kehidupan kontemporer disamping sesuai dengan kehidupan Makkah dan Madinah di abad-7 Masehi. Dalam mengemukakan pandangannya, Ahmad Hassan tak pandang bulu. Siapa saja yang menurutnya tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, akan menjadi sasaran kritiknya yang tajam dan dalam.

2. Tata Negara Menurut Ahmad Hassan

Banyak karangan Ahmad Hassan yang menjabarkan tentang beberapa konsepsi Islam tentang kebangsaan, dalam batas mana dianggap menyimpang dan sejauh mana dianggap wajar menurut dasar-dasar pendangan Islam. Dan menurut Ahmad Hassan, jika faham kebangsaaan seperti apa yang dalam pemahaman di atas, maka secara tegas beliau menolaknya, karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

لْيسَ مِنا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيةٍ وَلْيسَ مِنا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيةٍ وَلْيسَ مِنا مَنْ مَاتَ عَلَـى عَصَبِيةٍ.

"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada 'ashabiyyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar 'ashabiyyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati orang yang membela 'ashabiyyah "

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الرجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَتَهُ وَيُقَاتِلُ حَمِيَتَهُ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اَي ذَلِكَ يَكُوْنُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؟ فَقَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ اَلْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

"*Rasullah S.A.W ditanya tentang seorang yang berperang karena keberanianya, berperang karena mempertahankan diri dan berperang karena riya'. Manakah yang termasuk di jalan Allah? Resulallah menJawab: barang siapa yang berperang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, maka ia di jalan Allah*".

عَنْ وَاثِلَةِ بْنِ اَلأَسْقَعِ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ . أَمِنَ العَصَبِيةِ اَنْ يُحِـب الرجُلُ قَوْمَهُ قَالَ : لَا, وَلٰكِنْ مِنَ اَلعَصَبِيةِ اَنْ يَنْصُرَ الرجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظلْمِ.

"Dari Watsilah Ibnu Asqa' : Saya bertanya kepada Rasulallah SAW Apakah seorang yang mencintai kaumnya itu termasuk 'ashabiyyah, Rasulallah menjawab: tidak, tetapi yang termasuk 'ashabiyyah ialah bila seorang menolong kaumnya dalam kedzaliman".

Ahmad Hassan menilai bahwa umat Islam harus melaksanakan hukum-hukum Allah, dan untuk itu harus ada pemerintahan Islam. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengharuskan terlaksananya hukum-hukum Allah. Jika tidak menjalankan perintah Allah, berarti berbuat kedzaliman. Hal inilah yang dikatakan oleh Ahmad Hassan dengan pergerakan faham kebangsaan saat itu, sehingga ia menilai, bahwa masuk dan membantu pergerakan-pergerakan yang berdasar kebangsaan itu dosa, dan sekurang-kurangnya pergerakan kebangsaan itu menuju kepada membuang undang-undang Allah dan Rasul-Nya, dan mengantikan dengan hukum-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bikinan manuasia, sebagaimana telah nyata dalam teori dan praktek-praktek mereka.

Cinta bangsa dan tanah air yang dibenarkan bagi seorang muslim menurut Ahmad Hassan ialah cinta yang diwujudkan dengan usaha dan kerja keras, agar kaum muslimin:

a. Maju dalam pendidikan
b. Maju dalam ekonomi
c. Maju dalam teknologi
d. Sekurang-kurangnya tidak dibawah negara lain
e. Mengurus negerinya sendiri dengan hukum dan peraturan yang termaktub dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul.[32]

Pemerintahan Islam, menurut Ahmad Hassan, akan memberikan kepada pemeluk agama lain hak-haknya. Pemeluk agama lain diberikan kebebasan antara lain:

a. Makan dan minum, kecuali minuman keras
b. Berpakaian, asal menutup bagian badan yang dipandang aurat oleh Islam dan menurut cara-cara yang diatur oleh pemerintah
c. Menjalankan perintah masing-masing
d. Mendirikan tempat-tempat ibadah
e. Menjalankan cara perkawinan dan pembagian harta pusaka mereka

[32] A. Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, h.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membuka tempat-tempat pendidikan bahasa, agama dengan cara-cara mereka
g. Mendirikan Mahkamah yang memutuskan perselisihan diantara mereka sendiri
h. Duduk dalam pemerintahan Islam, asal jangan sampai mengalahkan yang beragama Islam.[33]

Cita-cita pergerakan Islam menurut Ahmad Hassan akan bisa terwujud dengan berdirinya pemerintahan Islam. Yaitu dengan cara pemilihan khalifah atau ketua pemerintahan Islam yang bisa dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang dinamakan Ahlul Halli wal 'Aqdi atau dipilih langsung oleh rakyat. Yang paling penting menurut beliau adalah pemilihan pemimpin atau khalifah harus dilaksanakan secara demokrtis dan tidak ada sistem warisan. Dan para pejabat lainnya bisa dipilih oleh Presiden, para wakil rakyat, atau rakyat, tergantung situasi dan kondisi.

Dalam masalah pengangkatan pejabat negara. Ahmad Hassan belum punya konsep yang jelas. Hal ini nampak dalam pernyataannya yang membolehkan rakyat untuk mengangkat para menteri dan pejabat tinggi negara. Penggankatan tersebut merupakan suatu konsep yang sulit yang direalisasi pada zaman sekarang. Disitulah kekaburan konsep Ahmad Hassan. Hukum-hukum yang boleh diubah oleh MPR adalah hukum yang berkaitan dengan masalah kehidupan dunia saja, sedang hukum agama tidak boleh di

[33] Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, h.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ubah-ubah. Jadi kehendak rakyat tidak boleh bertentangan dengan nash. Meskipun Ahmad Hassan digolongkan kaum "fundamentalis", namun beliau mesih mengakui adanya hak asasi manusia.

Dalam teori pemerintahan cara Islam, menurut Ahmad Hassan adalah sebagai upaya untuk mendamaikan teori politik Islam dengan teori-teori pemerintahan demokrasi modern. Ahmad Hassan beranggapan bahwa demokrasi telah diakui di awal Islam dalam pemilihan khilafah pertama Abu Bakar dan dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh khalifah Umar, dan sebenarnya, seluruh dunia telah belajar demokrasi dari Islam. Pemerintahan Islam didasarkan pada al-Qur'an dan musyawarah, karena Islam memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang tidak dapat dilanggar, maka ia mengeliminir banyak perangkap demokrasi yang semata-mata didasarkan pada kehendak rakyat, yang mungkin saja memilih banyak dosa. Ahmad Hassan menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk demokrasi Islam tidak berbeda dari bentuk-bentuk demokrasi lain dan pejabat-pejabat seperti perdana menteri serta lembaga-lembaga seperti kabinet dan parlemen akan dibutuhkan, bahkan walau dalam Islam.[34]

Suatu hari, seusai memberikan ceramahnya, Ahmad Hassan ditanya oleh seseorang, yang menanyakan bahwa, pemerintahan Islam itu berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan musyawarah. Sedangkan pemerintahan demokrasi *tulen*, hanya dengan *rembukan* rakyat. Diatara dua ini, mana yang menurut

[34] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam,* h.151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustadz Hassan lebih baik? Ahmad Hassan menjawab bahwa, pemerintahan cara demokrasi atau kedaulatan rakyat, semata-mata berdasar kemauan rakyat. Kalau rakyat mau halalkan zina, mengizinkan produksi minuman Alkohol, dan seterusnya, niscahya boleh. Sedangkan menurut Islam, yang haram tetaplah haram, yang makruh tetaplah makruh, dan yang Sunnah tetaplah Sunnah. Kedaulatan rakyat berlaku di urusan-urusan luar dari yang tersebut. Dalam pandangan Ahmad Hassan, dalam pemerintahan cara Islam, maksiat tidak bisa jadi perkara biasa. Sedangkan dalam sistem pemerintahan demokrasi *tulen*, yang haram bisa jadi halal, yang wajib bisa jadi haram, asalkan dikehendaki oleh rakyat. Dari paparan di atas maka Ahmad Hassan menyerahkan kapada kita untuk memilih dan mengetahui mana yang labih baik.[35]

Walaupun manusia secara umum bebas untuk mengubah hukum *Wad'i*, yaitu ukuran-ukuran sosial politik, dengan tanpa dosa. Tetapi Ahmad Hassan memperingatkan agar hukum-hukum semacam itu tidak bertentangan dengan syari'ah yang mengatur ketentuan-ketentuan minimum bagi perilaku yang baik dalam urusan manusia. Dalam buku *Islam dan Kebangsaan*, Ahmad Hassan membahas konflik yang mungkin terjadi antara kedua tipe hukum ini dan memperingatkan bahwa siapa pun juga yang tidak memberikan tempat yang layak kepada hukum-hukum syari'at, maka di dunia dan ahirat termasuk kafir, zalim dan fasik.

[35] Harry Muhammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20*, h.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ahmad Hassan, orang semacam ini adalah kafir jika ia bependapat bahwa ada hukum yang lebih baik dari pada hukum Tuhan, zalim jika ia membuat hukum yang tidak sesuai, yaitu hukum yang bertentangan dengan syari'at ketika hukum itu harus dibuat, dan fasik jika ia mengetahui keberadaan hukum Tuhan dalam masalah tertentu, tetapi secara sengaja atau terpaksa, menghakimi dengan hukum-hukum yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi Ahmad Hassan mengakui bahwa syari'at dan hukum *Wad'i* kadangkala terkait erat, sulit untuk memahami perbedaan dalam peristiwa, dan kadangkala terjadi kebingungan di kalangan umat Islam yang saleh.[36]

3. Undang-Undang Menurut Ahmad Hassan

Kaum muslim sering kali merasa kesulitan untuk menyesuaikan hukum-hukum yang diterapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah bagi suatu tindak kejahatan tertentu (*hudud*) dengan norma-norma dan prilaku sosial masa kini. Ada banyak kritik yang disampaikan baik oleh pihak muslim maupun non muslim terhadap hukuman-hukuman semacam ini, seperti terhadap hukuman cambuk bagi para pezina dan hukuman potong tangan untuk pencuri. Kelompok-kelompok sekularis di Indonesia menganggap hukuman-hukuman semacam ini sama sekali tidak cocok untuk diterapkan, dan bahkan

[36] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia Abad-20,* h.55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi-organisasi muslim sendiri berusaha membuat hukuman-hukuman tersebut menjadi lebih ringan.[37]

Salah satu organisasi muslim, yang berusaha mengikuti semangat dari perintah-perintah tersebut, misalnya, berkeyakinan bahwa pencurian harus dihukum dengan penjara dan menandaskan bahwa kurungan semacam ini merupakan pembatasan atas kekuatan si pencuri untuk mencuri, yaitu makna figurative dari "memotong tangan seseorang". Maka tidak seperti organisasi muslim seperti ini. Ahmad Hassan menginterprestasikan hukuman untuk pencuri itu secara harfiah dan menandaskan bahwa tangan seorang pencuri harus di potong, karena Tuhan telah memerintahkanya dengan jelas.

Dalam pemerintahan cara Islam, Ahmad Hassan mempertahankan pandangan ini dengan manyatakan bahwa hukuman yang keras semacam ini dapat digunakan sebagai peringatan konstan bagi para penjahat dan dapat mencegah orang lain dari melakukan tindak kejahatan serupa. Ahmad Hassan mengakui bahwa aturan Islam tentang hukuman memang sangat keras dan menyatakan bahwa aturan itu dibuat dengan maksud untuk menakuti. Namun Ahmad Hassan membenarkan pendekatan semacam ini, dengan menyatakan bahwa "90 persen hukum di negara-negara non-muslim di maksud untuk tujuan itu (yakni menakuti masyarakat)" dan bahwa "pelanggaran hukum lebih tinggi terjadi di wilayah-wilayah non-muslim". Beliau menyimpulkan bahwa jika aturan Islam tentang hukuman berat itu diterapkan secara regular

[37] Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim,* h,380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diseluruh Indonesia, maka akan timbul banyak kesulitan di awal, "tetapi ketika generasi-generasi berlalu, maka kelompok baru, akan lebih kecil kemungkinanya untuk melakukan kesalahan. Dan negara akan menjadi semakain lurus dan benar"[38].

Persatuan Islam, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Hassan, menjawab bahwa 90% penduduk Indonesia adalah muslim, dan mayoritas mutlak semacam itu harus menentukan prinsip-prinsip dasar dan arah gerakan nasioanalis. Menurut Ahmad Hassan, "apakah layak, bahwa kita menghapus makna penting 90% mayoritas dikarenakan 10% minoritas? Apakah itu akan menjadi pemecah yang adil". Disamping itu, dipakainya prinsip-prinsip Islam oleh gerakan nasionalis tidaklah bertentangan dengan di masukkannya pemeluk agama-agama lain yang hak-hak mereka akan di hormati oleh Islam. "Suka atau tidak suka", menurut Ahmad Hassan, seorang muslim harus mengunakan Islam di setiap tempat dan setiap hal. Mengenai kelompok lain di luar Islam tidaklah benar, agama mereka tidak melarang mereka untuk mengikuti dasar apapun. Siapa pun juga yang melakukan itu, maka ia melakukanya dari pilihan pribadi yang bisa diubah.[39]

Pemikiran Hassan tentang faham kebangsaan dan pemerintahan, adalah cerminan sikap politiknya terhadap situasi dan kondisi politik di Indonesia. Pemerintahan Islam baginya adalah pilihan lain dari faham

[38] *Ibid*, h.381
[39] A. Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, h.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangsaan yang dianggapnya sebagai tidak memberikan tempat bagi agama. Beliau menginginkan Islam memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, sesuai dengan keyakinan bahwa kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Islam dipandang sebagai sesuatu yang tertinggi dan terluas menerjang batas-batas kebangsaan dan ketanahairan.

D. POSISI PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DALAM PETA PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana mendudukkan agama dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Delier Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik. Akan tetapi, untuk mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam realitasnya menjadi suatu problem tersendiri.[40]

Dalam wacana lain, sebenarnya bentuk Islam liberal tidak satu seperti yang banyak dilihat orang di luar Islam. Menurut Kurzman, ada tiga kelompok dalam pemetaannya. *Pertama,* kelompok yang memandang al-Qur'an memberikan solusi bagi seluruh permasalahan, yang diwakili oleh Rosyid Ridla di Mesir, dan Amin Rais. *Kedua,* kelompok yang memandang al-Qur'an tidak membicarakan secara eksplisit terhadap beberapa permasalahan seperti praktek politik. Pemikiran ini diwakili oleh Ali Abdul Raziq di Mesir, dan Abdurrahman Wahid. *Ketiga,* kelompok yang

[40] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan perlunya al-Qur'an ditafsirkan secara keseluruhan dengan tafsir yang baru, tokoh ini antara lain Mohammad Arkoun dan Nurcholis Madjid.[41]

Dari berbagai sudut pandang, ajaran, serta aktifitas Ahmad Hassan dengan kelompok lain menunjukan bahwa, selama era ini, Ahmad Hassan merupakan begian dari dunia Sunni. Ahmad Hassan memiliki kesamaan dengan gerakan-gerakan pembaharuan modernis di dunia Islam lainnya. Terdapat kesamaan yang mencolok antara penjelasan Ahmad Hassan dan penjelasan Afgani-Abduh-Ridha tentang modernisme Islam. Dan sesungguhnya, seluruh gerakan modernis di Indonesia merupakan perkembangan lanjutan dari mazhab pemikiran tersebut. Lebih lanjut, Ahmad Hassan muncul pada saat belum di gunakannya istilah "fundamentalis" untuk menyebut kelompok-kelompok muslim yang memiliki pemikiran kaku tentang ajaran-ajaran agama dan mengharuskan seluruh muslim untuk menerima ajaran-ajaran Islam versi mereka.[42] Dalam pandangan fundamentalis, seiring dengan kecenderungan penafsirannya terhadap doktrin yang bercorak *rigid* (kaku) dan *literalis*, fundamentalisme memandang bahwa corak pengaturan doktrin bersifat total dan serba mencukup, tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini yang luput dengan jangkauan doktrin yang

[41] Moh Nurhakim, *Islam Responsif*, h.95
[42] Howard M Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, h.240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serba mencukup itu.[43] Hal itu sejalan dengan pemikiran Ahmad Hassan yang menginginkan Islam memasuki seluruh aspek kehidupan.

Pemikiran Ahmad Hassan yang tertuang dalam Persatuan Islam meyakini bahwa perintah dan larangan yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah berupa larangan minum-minuman keras, berjudi, melakukan tindakan moral, harus segera dilaksanakan dalam negara. Terkait masalah hukum-hukum yang lain dalam sebuah negara, Ahmad Hassan beranggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang lain akan ditentukan oleh para legeslasi-legeslasi dan pengadilan-pengadilan yang merujuk pada ajaran agama. Dengan mengambil rujukan pada al-Qur'an dan Sunnah.[44]

Ahmad Hassan menghadirkan ide keagamaan yang mengambarkan peribadatan dan kewajiban-kewajiban syari'ah lainnya sebagi faktor penting dalam kehidupan. Ahmad Hassan juga menekankan agar kaum muslimin menghilangkan semua kepercayaan dan praktek yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Usaha untuk menjadikan Islam sebagai faktor yang paling penting bagi kehidupan bangsa Indonesia bukan merupakan usaha yang baru dalam sejarah Islam, sebab hal itu sudah menjadi komitmen dalam Islam. Misi Persatuan Islam jelas sangat penting khususnya karena menyatakan

[43] Yusril Ihza M, *Modernisme dan Fundamentalisme*, h.31
[44] Howard M Federspiel, *Persatuan Islam,* h.214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali cita-cita sejarah Islam dalam sebuah bangsa yang belum lama memeluk Islam.[45]

Pesan Persatuan Islam itu bertujuan untuk memperkokoh dan memperkuat perkembangan lembaga-lembaga Islam yang baru yang diperlukan untuk memperdalam dan memantapkan keimanan dalam praktek keagamaan di Indonesia. Sehingga dengan demikian akan menjadikan Islam sebagai faktor yang dominan bagi bangsa Indonesia dan dalam kehidupan nasional Indonesia.[46]

[45] *Ibid,* h. 241
[46] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam,* h.242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD HASSAN TENTANG POLITIK ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI POLITIK INDONESIA

A. ANALISIS POSISI PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DALAM PETA POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana mendudukkan agama dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Delier Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik. Akan tetapi, untuk mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam realitasnya menjadi suatu problem tersendiri.[1]

Begitu pula ketika Indonesia membangun hubungan antara agama dan politik. Kesulitan ini pernah diungkapkan oleh Zifirdaus Adnan sebagaimana dikutip Bactiar Efendi, Ia menjelaskan bahwa hubungan ini begitu sulit sebab terdapat dua arus besar: *pertama,* kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara, baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai negara, atau negara yang memberlakukan Islam. *Kedua,* kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk apapun.[2] Hubungan yang tidak harmonis ini terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan para pendiri republik ini, yang sebagian besar muslim, mengenai

[1] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, h.1
[2] Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam*, h.vii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan di atas adalah apakah negara Indonesia bercorak Islami atau nasionalis.

Selama ini pemikiran Ahmad Hassan yang tertuang dalam Persatuan Islam seperti gerakan-gerakan di Indonesia, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bentuk pemerintahan Indonesia di masa depan dan apakah ia pada ahirnya akan menerima karakter Islam. Ahmad Hassan dan para anggota Persis lainnya menggabungkan diri mereka ke dalam negara Indonesia yang muncul selama era Revolusi dan menganggap keberadaannya sebagai realitas sejarah yang penting. Bagaimanapun, keberadaan bangsa Indonesia merupakan personifikasi dari kemerdekaan yang telah diperjuangkan begitu lama melawan Belanda dan Jepang.[3]

Ahmad Hassan mewajibkan kepada seluruh umat Islam terkait masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Maka seharusnya kaum muslimin memahami secara lebih baik ajaran-ajaran agama mereka. Ahmad Hassan menekankan bahwa hukum syari'at lebih maju daripada hukum adat maupun hukum sekuler, dan penolakannya untuk mengakomodasikan kedua sistem itu, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak mendasar, tidak mendamaikan tiga kecenderungan luas yang berkembang dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia itu. Penekanan Ahmad Hassan seperti itu juga dimaksudkan

[3] Howard M Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, h.340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyajikan pemahaman yang khas bagi umat Islam mengenai masalah-masalah yang dihadapi para pemeluk sistem ajaran yang lain.[4]

Sumbangan khusus Ahmad Hassan yang termuat dalam Persatuan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia adalah peranan yang dimainkannya bagi kalangan awam dalam menentukan prilaku keagamaan mereka sendiri. Baik kalangan tradisionalis maupun modernis telah memberikan penekanan yang besar terhadap ulama', yang secara umum agak meninggalkan kalangan awam dan hanya memperhatikan ajaran dan praktek keagamaan bagi dirinya sendiri yang sejalan dengan pandangan-pandangan ulama yang pernah didengarkannya secara langsung. Walaupun melakukan penelitian masalah keagamaan, tetapi Ahmad Hassan tetap memberikan sedikit kesempatan kepada kalangan awam untuk ikut serta dengan sedikit pemahaman mereka. Dengan cara ini, kalangan awan akan memilih diantara keputusan-keputusan dari berbagai ulama mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi pemahaman dan praktek keagamaan mereka.[5]

Allan Samson sebagaimana dikutip oleh Zakki Fuad menyatakan pandanganya tentang *Religio Political Behavior* menyatakan bahwa, Ahmad Hassan adalah seorang tokoh yang "fundamentalis". Ia berkeyakinan hanya Islam yang memberikan dasar dan moral bagi negara, dan bahwa undang-undang, dan peraturan-peraturannya mewujudkan perintah al-Qur'an haruslah

[4] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam,* h.243
[5] *Ibid*, h.245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan.[6] Dalam memberikan dasar-dasar pemerintahan Islam Ahmad Hassan mengutip surah an-Nisa': 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ .

""Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ketua-ketua diantara kamu".

Ahmad Hassan menyatakan bahwa ayat diatas mewajibkan kita taat kepada Allah, Rasul dan ketua-ketua kita. Allah dan Rasulnya maksudnya ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya dan menghukum menurut apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan ketua-ketua maksudnya adalah tidak dalam urusan ibadah, tapi semata-mata masalah keduniaan, karena ibadah itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya.

Dari berbagai sudut pandang, ajaran, serta aktifitas Ahmad Hassan dengan kelompok lain menunjukan bahwa, selama era ini, Ahmad Hassan merupakan begian dari dunia Sunni. Ahmad Hassan memiliki kesamaan dengan gerakan-gerakan pembaharuan modernis di dunia Islam lainnya. Terdapat kesamaan yang mencolok antara penjelasan Ahmad Hassan dan penjelasan Afgani-Abduh-Ridha tentang modernisme Islam. Dan sesungguhnya, seluruh gerakan modernis di Indonesia merupakan perkembangan lanjutan dari mazhab pemikiran tersebut. Lebih lanjut, Ahmad Hassan muncul pada saat belum di gunakannya istilah "fundamentalis" untuk menyebut kelompok-kelompok

[6] AH Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional, Pemikiran Fundamental Vs Liberal*, h.149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim yang memiliki pemikiran kaku tentang ajaran-ajaran agama dan mengharuskan seluruh muslim untuk menerima ajaran-ajaran Islam versi mereka.[7] Dalam pandangan fundamentalis, seiring dengan kecenderungan penafsirannya terhadap doktrin yang bercorak *rigid* (kaku) dan *literalis*, fundamentalisme memandang bahwa corak pengaturan doktrin bersifat total dan serba mencukup, tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini yang luput dengan jangkauan doktrin yang serba mencukup itu.[8] Hal itu sejalan dengan pemikiran Ahmad Hassan yang menginginkan Islam memasuki seluruh aspek kehidupan.

Dalam pandangan Howard M Federspiel, Ahmad Hassan di golongkan dalam pemikir yang fundamental, yang ingin mengubah masyarakat sampai ke akar-akarnya, dan ingin menghancurkan penyakit umat Islam dengan cara yang radikal dan revolusioner, secara jelas, tanpa samar-samar, tanpa sungkan-sungkan, dan dengan penuh kepastian.[9]

Pandangan Ahmad Hassan yang tergambar dalam pandangan Persatuan Islam, tentang negara Islam adalah mirip dengan pandangan Muhammadiyyah, karena Ahmad Hassan dan pemimpin-pemimpin Persatuan Islam meyakini bahwa masyarakat terlebih dahulu harus di bentuk sebelum sebuah negara Islam benar-benar dapat kuat dan efektif. Isa Anshary menyatakan bahwa tujuan kaum muslimin, baik politik agama, sosial atau

[7] Howard M Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, h.240
[8] Yusril Ihza M, *Modernisme dan Fundamentalisme*, h.31
[9] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, h.202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi akan berhasil apabila pertama-tama diciptakan suatu masyarakat yang dibangun secara spiritual oleh anggota-anggotanya. Dalam hal ini, Ahmad Hassan melihat aktifitas politik sangat berguna dalam promosi religius diseluruh lapisan masyarakat disamping berguna untuk memerangi apa yang ia anggap sebagai kecenderungan-kecenderungan sekuler yang membingungkan yang di promosikan oleh partai-partai politik non-muslim.

Pemikiran Ahmad Hassan yang tertuang dalam Persatuan Islam meyakini bahwa perintah dan larangan yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah berupa larangan minum-minuman keras, berjudi, melakukan tindakan moral, harus segera dilaksanakan dalam negara. Terkait masalah hukum-hukum yang lain dalam sebuah negara, Ahmad Hassan beranggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang lain akan ditentukan oleh para legeslasi-legeslasi dan pengadilan-pengadilan yang merujuk pada ajaran agama. Dengan mengambil rujukan pada al-Qur'an dan Sunnah.[10]

Ahmad Hassan menghadirkan ide keagamaan yang mengambarkan peribadatan dan kewajiban syari'at lainnya sebagai faktor penting dalam kehidupan. Ahmad Hassan juga menekankan agar kaum muslimin menghilangkan semua kepercayaan dan praktek yang dipandang bertentangan dengan Islam. Usaha untuk menjadikan Islam untuk menjadikan Islam sebagai faktor yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia bukan merupakan usaha yang baru dalam sejarah Islam, sebab hal itu sudah menjadi komitmen Islam.

[10] Howard M Federspiel, *Persatuan Islam,* h.214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi Ahmad Hassan menyatakan kembali kepada cita-cita sejarah Islam dalam sebuah bangsa yang belum lama memeluk Islam.[11]

Dalam bangsa seperti itu terdapat lembaga-lembaga keagamaan asli yang sudah tidak mengembangkan pandangan yang sesuai dengan cita-cita Islam itu. Pesan Ahmad Hassan itu bertujuan untuk mengembangkan, memperdalam dan memperluas keimanan serta praktek keagamaan di Indonesia sehingga dengan demikian menjadikan Islam sebagai faktor yang dominan bagi bangsa Indonesia dan kehidupan nasional Indonesia.[12]

Ahmad Hassan menulis dua pamflet yang mendukung pemerintahan republik pada awal tahun 1946, yang mengidentifikasi aktivisme politik muslim dengan negara Indonesia baru. Dalam tulisannya yang berjudul *Kedaulatan*, yang tampaknya ditujukan untuk menjawab kritik dan ketidaksabaran beberapa faksi muslim terhadap pemerintahan Soekarno. Ahmad Hassan meyakinkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya persatuan, maka dari itu, umat muslim harus menegakkan sebuah pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada hukum agama Islam. Ahmad Hassan berpendirian, jika Indonesia menjadi negara sekuler akan banyak kekurangan, tetapi kekurangan yang disebabkan sekularisme itu harus

[11] Howard M. Federspiel, *Pesatuan Islam,* h.241
[12] *Ibid*, h.242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperangi secara damai, dengan khotbah-khotbah dan nasehat-nasehat yang bijak.[13]

B. ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DALAM TIPOLOGI PEMIKIRAN ISLAM

Banyak konstruk pemikiran yang melahirkan berbagai pandangan tentang bagaimana kita, sebagai kaum muslimin menyikapi politik. Tentang bentuk kenegaraan yang seperti apa yang harus dipakai oleh suatu negara. Dari beberapa pemikiran para tokoh itu semua yang ahirnya mengarah pada karakter dan tipologi politik Islam itu sendiri. Namun secara umum para pemikir membaginya dalam tripologi. Dalam pandangan A. Djazuli, beliau membagi kerangka berfikir dunia Islam dewasa ini menjadi tiga tipe, *pertama*, liberal (sekuler) yaitu negara menolak hukum Islam secara penuh, *kedua,* fundamental (intergralistik) yaitu negara melaksanakan hukum Islam secara penuh, *ketiga,* moderat (simbiotik) yaitu negara yang tidak menjadikan sebagai suatu kekuatan struktural (dalam sektor politik), tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural, atau mencari kompromi.[14] Sedangkan menurut Din Syamsuddin, paradigma pemikiran politik Islam modern dibagi atas "tradisionalis", "modernis", dan "fundamentalis".[15]

---

[13] Howard M. Federspiel, *Labirin Idiologi Muslim*, h.303
[14] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* h.39
[15] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h.116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tipologi Liberal

Paradigma liberal, sesuai dengan maknanya yang sederhana, adalah bebas, merdeka dan tidak terikat. apabila diletakkan dalam konteks pemikiran, maka seorang yang memiliki tipikal berfikir liberal adalah mereka yang bebas untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat serta merdeka tanpa harus terikat pada segala bentuk pengetahuan dan otoritas manapun. Model demikian biasanya menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaanya. Manusia sebagaimana yang pernah menjadi diktum awal *renaissance* adalah subyek otonom. Subyek yang memiliki kesadaran untuk berfikir, berbuat dan bertindak[16].

Pola liberal ini menekankan pemisahan antara agama dan negara, yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah politik atau kenegaraan. Islam hanyalah mengatur hubungan antara menusia dan Tuhan. Para penganut tokoh ini beranggapan bahwa agama itu bersifat universal sedangkan politik itu portikular (individu), maka dari itu antara agama dan politik tidak bisa bersatu.

2. Tipologi Fundamental

Secara harfiah istilah fundamental berarti mendasar, yang digunakan untuk menunjuk sikap politik suatu kelompok yang ekstrim, fanatik dan keras kepala. Golongan mengungkapkan bahwa Islam mencakup semua aturan

[16] Listiyono Santoso, *Idiologi Politik Gus Dur*, h.89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan, termasuk urusan politik atau kenegaraan. Argumen yang diberikan oleh kelompok ini, bahwa Nabi telah selesai dan telah memberikan garis panduan yang jelas seperti ketika Nabi berada di Madinah.[17]

Di pusat Islam (Makkah-Madinah), semangat pembangunan sosio-moral mencapai puncaknya pada abad ke-18 dengan gerakan fundamentalis yang dikembangkan oleh Abd al-Wahab. Para pengikutnya menyebut dirinya sebagai "Muwaḥḥidūn" yang berarti pengikut tauhid, tetapi mereka umumnya lebih dikenal dengan sebutan Wahabi., gerakan Wahabi mengambarkan prototipe semangat fundamentalisme dalam pengalaman Islam modern[18].

Disamping garis perkembangan fundamentalis tersebut, tahun 1970-an merupakan suatu periode dimana bentuk fundamentalis juga memiliki bentuk yang radikal. Ungkapan kesetiaan terhadap al-Qur'an dan Sunnah serta penolakan dengan lembaga-lembaga yang ada dalam tradisi abad pertengahan, Fundamentalisme radikal terikat dalam suatu reorientasi tentang tradisi Islam. Radikalisme ini merupakan sintesis dari radikalisme yang telah ditransformasikan pada tahun 1960-an dan semangat fundamentalis Islam. Fundamentalis radikal menekankan partisipasi masa, kontrol partisipatori, identitas unit yang kecil dan menghilangkan perbedaan-perbedaan sosio-politik lama[19].

---

[17] Moh. Nurhakim, Islam Responsif, h.100-102
[18] John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, h.90
[19] *Ibid*, h.356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tipologi Moderat

Pemikiran ini mengutarakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan yang pasti tentang masalah politik atau tata negara, namun ada prinsip atau asas yang harus ditegakkan. Memang Rasulullah S.A.W bukan diutus sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai Rasul. Perlu diketahui, konsep kerasulan beliau tidak sebatas menyampaikan pesan Allah (dakwah). Yang paling berat adalah menjadi contoh dan suri-tauladan dalam melaksanakan Islam sebagai cara hidup (*way of life*). Dalam masa yang singkat, beliau telah berhasil membuat perubahan dan reformasi kesesuaian dimana budaya, pemikiran dan sosio-politik bangsa Arab maju dan gemilang. Semua perubahan ini berlaku karena beliau telah membuat perancangan dan program yang jitu dan bijaksana. Ini dapat dilihat bagaimana beliau berhijrah, membina persaudaraan, membentuk tatanan sosial, membangun ekonomi, politik, dan sosial umat Islam di Madinah.

Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak akan bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara politik dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract,* tetapi bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja diwarnai oleh hukum agama (syari'ah). Singkatnya, syari'ah memiliki peran sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik.[20]

Fazlurrahman adalah salah satu penggagas yang dinilai sementara kalangan sebagai pemikir orisinal tentang Islam. Terutama ide-ide neo-modernisme yang merupakan gagasan brilian yang hadir dalam wacana baru menggali sumber-sumber nilai Islam langsung pada pokoknya yaitu al-Qur'an. Neo-modernismenya memang selain menyuarakan kemodernan pemahaman Islam juga ditambah dengan kemampuan mengunakan metodologi sistematik tentang al-Qur'an. Begitu juga dalam pemikiran modernisme, lebih banyak mengadopsi gagasan barat dalam perspektif pemikiran barat. Sehingga ada kesan orisinalitas pemikiran Islam telah terbaratkan dalam wacana modernisme. Jadi pemikiran neo-modernisme mengambil bentuk paling mutahir baik dalam terma-terma keIslaman maupun metodologisnya[21].

Al-Qur'an dan Sunnah dinilai memuat pesan-pesan universal. Namun pesan itu tidak akan mudah ditangkap, apabila orang kehilanggan cara memahami dalam perspektif yang bersifat histories dengan mempunyai dua dimensi global, pertama dimensi Islam sejarah dan kedua dimensi Islam cita-cita. Jadi Islam harus ditangkap secara utuh dan mempertimbangkannya

[20] M. Din Syamsudin "*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", Dalam Abu Zahra, Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia,* h.45

[21] Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Perkembangan Modern dalam Islam*, h.258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kritis latarbelakang sosio-kultural turunnya ayat. Apabila tidak mampu menagkapnya, maka akan kehilangan ruhnya yang berarti dalam porsoalan nilai praktis kemanusiaan dengan kehidupan kolektif. Disinilah dinamakannya esensial moral kandungan al-Qur'an mutlak diselami terlebih dahulu sebelum dengan tegas menetapkan kekuatan hukum atas suatu persoalan.[22]

C. SOSOK DAN PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DALAM PANDANGAN BEBERAPA TOKOH

Berbeda pendapat adalah merupakan hal yang biasa terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Perbedaan itu bukan saja terjadi diantara pemeluk agama, tetapi juga antara satu pemeluk agama, misalnya saja antara pemeluk Islam itu sendiri. Tetapi sepanjang perbedaan itu tidak menyangkut prinsip-prinsip akidah, maka ia diharapkan akan mambawa rahmad dan hikmah yang besar, bila didasarkan dengan pemikiran dan pertimbangan yang sehat.

Demikian juga apa yang terjadi pada sosok Ahmad Hassan. Dengan berbagai pendapatnya serta buah pemikirannya, beliau memperoleh tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak, termasuk para ulama' dan pemimpin Islam dan juga negarawan Indonesia sendiri terkait masalah politik keneganraan Ahmad Hassan.

Ahmad Hassan sendiri tahu bahwa pendirianya yang terlalu keras dalam agama itu akan menimbulkan banyak orang benci dan memusuhinya, bahkan

[22] *Ibid,* h.259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari teman-temanya sendiri. Tapi beliau tidak memperdulikan itu. Disayangi atau dibenci, buat Ahmad Hassan adalah urusan orang lain. Tapi bagaimanapun orang membenci dan memusuhinya, ia tidak pernah memberi kesempatan (jalan) buat orang lain untuk memusuhi pribadinya.[23]

Salah seorang yang memberikan tanggapan terhadap pikiran Ahmad Hassan adalah Hamka. Hamka menyatakan bahwa, orang ketiga yang menjadi penyiar Abduh di Jawa adalah Syaikh Ahmad Hassan. Dan keistimewaan beliau adalah kekuatan hujjahnya dan teguhnya mempertahankan pendirian yang beliau yakini kebenarannya. Ahmad Hassan adalah orang yang kuat hatinya, kuat hujjahnya dan pahit kritiknya, kalau perlu terhadap kawannya sendiri beliau berkata dengan jujur, meskipun hal itu menyakiti hatinya.

Sedangkan H. Tamar Djaja memberikan komentar bahwa, kalau dikatakan bahwa Ahmad Hassan adalah ulama' yang paling alim diseluruh Indonesia, mungkin dianggap terlalu dibesar-besarkan. Akan tetapi menurut ulama'-ulama' terbesar di Jawa yang ditanya beliau, menyatakan bahwa Ustadz Ahmad Hassan alim besar.[24]

Ahmad Sorkati, ulama' asal Sudan yang juga pendiri Jamiyyah Al-Irsyad itu, memberikan tanggapan tentang Ahmad Hassan. Bahwa Ahmad Hassan adalah orang yang terpelajar, mempunyai tingkatan tauhid yang tinggi, dan

---

[23] Abdul Rahman Abdullah, *Gerakan Islam di Perlis, Sejarah dan Pemikiran*, h.133
[24] Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, h.42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pembela agama Allah yang selalu berjuang menghindarkan umat Islam dari kesesatan.[25]

Sebagai manusia, Ahmad Hassan mempunyai batasan usia. Beliau telah tiada. Tapi semangat pemurnian Islam yang dikumandangkannya dan ilmu yang diwariskannya, tidak akan pernah pudar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ini semua.[26]

[25] Harry Muhammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad*-20, h.20
[26] Harry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20*, h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagi berikut :

1. Dalam memandang politik Islam di Indonesia, prinsip dasar keyakinan Ahmad Hassan adalah mewujudkan suatu negara Islam yang sesuai dengan yang di kehendaki Tuhan. Maka, hal itu bisa tercapai dengan cara: *pertama,* kaum muslimin harus melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan. *Kedua,* menempatkan umat Islam pada ajaran Islam yang murni berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam akidah (kepercayaan dan keyakinan) maupun syari'at (hukum agama). Sistem kehidupan atau bentuk negara dalam pandangan Ahmad Hassan yaitu: *pertama,* adanya jama'ah (kehidupan yang bersatu). *Kedua,* mempunyai pemimpin (*imama*), dan *ketiga,* mempunyai kekuasaan (*imarah*). Ketiga unsur tersebut di atas menurut beliau telah di contohkan oleh Rasulullah.
2. Dalam penerapan konsep politik. Ahmad Hassan berkeyakinan bahwa pemerintahan Islam adalah pilihan lain dari faham kebangsaan yang dianggapnya tidak memberikan tempat bagi agama. Islam dipandang sebagai sesuatu yang tertinggi dan terluas menerjang batas-batas kebangsaan dan ketanahairan. Dalam teori pemerintahan cara Islam, Menurut Ahmad Hassan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai upaya untuk mendamaikan teori politik Islam dengan teori-teori pemerintahan demokrasi modern. Ahmad Hassan beranggapan bahwa demokrasi telah diakui di awal Islam dalam pemilihan khilafah pertama Abu Bakar dan dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh khalifah Umar. Dan sebenarnya, seluruh dunia telah belajar demokrasi dari Islam. Pemerintahan Islam didasarkan pada al-Qur'an dan musyawarah, karena Islam memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang tidak dapat dilanggar, maka ia mengeliminir banyak perangkap demokrasi yang semata-mata didasarkan pada kehendak rakyat, yang mungkin saja memilih banyak dosa. Ahmad Hassan menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk demokrasi Islam tidak berbeda dari bentuk-bentuk demokrasi lain dan pejabat-pejabat seperti perdana menteri dan lembaga-lembaga seperti kabinet dan parlemen akan dibutuhkan, bahkan walau dalam Islam.

3. Dalam peta politik Islam, Ahmad Hassan bisa dikatagorikan sebagai pemikir Islam fundamental karena Ahmad Hassan berkeyakinan bahwa hanya Islam yang memberikan dasar dan moral bagi negara, agama telah memberikan ajaran yang lengkap bagi kehidupan manusia. Dan bahwa undang-undang serta peraturan-peraturannya yang sesuai dengan al-Qur'an haruslah dilaksanakan. Ahmad Hassan ingin mengubah masyarakat sampai ke akar-akarnya, dan ingin menghancurkan penyakit umat Islam dengan cara yang radikal dan revolusioner secara jelas tanpa samar-samar dan penuh kepastian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya para pembaca meneladani jejak langkah dan perjuangan Ahmad Hassan.
2. Dalam menyikapi segala sesuatu, hendaknya tidak menyalahkan atau menuduh yang lain itu salah "karena mungkin pendapat saya benar, tapi mungkin saja salah. Sebaliknya, pendapat orang lain salah, tapi bisa saja benar".
3. Alangkah baiknya jika dikemudian hari ada penelitian tentang gagasan-gagasan Ahmad Hassan dari sudut pandang lain. Karena penelitian yang dilakukan untuk mengkaji Ahmad Hassan dirasa masih sangat minim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Khaliq Farid, *Fikih Politik Islam,* Jakarta, Amzah, 2005

Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006

Azwar, syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998

Barry, Al, Y. Dahlan, M Yacup, Lya Sfyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah, Seri Intelektual*. Surabaya, Target Press, 2003

Djazuli, H.A, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bogor, Prenada Media, Cet II, 2003

Dhakiri, M. Hanif, *Kiai Kampung & Demokrasi Lokal*, Jakarta, Kerjasama DPP PKB dan Kedaulatan Rakyat, 2007

Effendi, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta, Galang Press, 2001

Federspiel, M, Howard, *Labirin Idiologi Muslim*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2004

_____, *Persatuan Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Press, 1996

Fuad, AH. Zakki, *Negara Islam atau Negara Nasional*, Kediri, Jenggala Pustaka Utama, 2007

Hassan, A, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil, Persatuan, Cet III, 1972.

_____, *Soal-Jawab: Berbagai Masalah Keagamaan*, Bangil, Persatuan, 1985

Haji Abdullah, Abdul Rahman, *Gerakan Islam di Perlis, Sejarah dan Pemikiran*, Malaysia, Pena SDN.BHD, 1989

Hidayatullah, Moch Syarif, *Konsep Kepala Negara dalam Islam¸* dalam www. Hasanain .com, maret 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta, Gaya Media Pranata, 2001

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris,* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, edisi III, cet v, 1997

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Pencarian dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, cet III, 1996

Mahendra, Yuzril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 1999

Maududi, Al- Abul A'la, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, Cet ke-IV,

1995

Mughni, A, Syafiq, *Hassan Bandung*: *Pemikir Islam Radikal*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1994

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2002

Nurhakim, Moh, *Islam Responsif: Agama di Tengah Pergulatan Idiologi Politik dan Budaya Global*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942,* Jakarta, LP3ES, 1996

_____, *Islam dan Politik,* Jakarta, Yayasan Risalah, 2003

Rahman, Deddy, *Ulama' Besar*, Adiy Nawawi www.com, Maret 2009

Saefuddin, Didin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta, PT Grasindo, 2003

Salim, Haji Agus, *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004

Santoso, Listoyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Jogjakarta, Ar-Ruzzjogjakarta, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shoffan, Moh, *Jalan Ketiga Pemikiarn Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*,Jogjakarta, Ircisod, 2006

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1993

Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal dengan Majlis Tarjih PP Muhammadiyah*, Yogyakarta, Arti Bumi Intara, 2006

Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik, Era Orde Baru*, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2001

Syafi'ie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta, PT Rieneka Cipta, 2000

Sani, Abdul, *Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam,* Jakarta, PT Grafindo Persada, 1998

Thoha, Miftah, *Birokrasi & Politik Di Indonesia*, Jakarta, Raja Garafindo Persada, 2003

Voll, John Obert, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern,* Jogjakarta, Titian Ilahi Press, 1997

Zainuddin, A.R, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Pensil-324, 2004

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id